

**RENSTRA** 



**2025-2029**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL**

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah sekaligus sebagai landasan dalam mewujudkan Visi, Misi, tujuan, Sasaran, Indikator sasaran, Target Kinerja yang ingin dicapai, Strategi Pencapaian, Kebijakan dan Program Kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 ( lima ) tahun. Rencana Strategis ini mengacu pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar.

Berbagai tantangan dan harapan dalam kurun waktu 2025 – 2029 diakomodasikan dalam satu perencanaan strategis serta dipersepsikan dalam bentuk kebijakan. Tantangan di depan akan semakin kompleks, sehingga aktualisasi kebijakan strategis sebagai tindak lanjut dari rencana yang telah disusun sangat perlu menjadi komitmen bersama untuk mencapai hasil optimal. Harapan masyarakat yang semakin tinggi seyogyanya cepat direspon dengan pengembangan sistem, peningkatan kinerja dan kerja keras. Rencana strategis ini diharapkan dapat menjadi acuan bersama dalam melaksanakan administrasi kependudukan, sehingga pada tahun – tahun berikutnya Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi Kabupaten yang tertib Administrasi Kependudukan.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis ( Renstra ) yang kami buat ini tidak benar – benar sempurna. Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya kelak kami mengharapkan saran dan masukan dari stakeholder agar visi, misi strategis, kebijakan program dan kegiatan dalam renstra dapat terlaksana dengan sebaik –baiknya.

Semoga segala upaya baik selalu mendapat Ridha dan Perlindungan dari Allah Subhanahu Wata'ala, Amin.

Benteng, 20 September 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL



**Drs. ANTI PATONRANGI PASBAL, M. M**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19670905 198811 1 003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	9
1.4 Sitematika Penyajian .....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 12	
2.1.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Perangkat Organisasi... 12	
2.1.2 Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.. 30	
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil..... 33	
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	44
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian layanan .....	45
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	46
2.2.1. Permasalahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	46
2.2.2. Isu – Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 53	
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	57
3.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	57
3.3. Strategi dan Arah Kebijakan .....	63

BAB IV PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA  
PENYELENGGARAAN DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator, target dan  
pagu indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil... 72

BAB V : PENUTUP ..... 115

## DAFTAR TABEL

2.1.2.1 Klarifikasi Pegawai Menurut Golongan .....	30
2.1.2.2 Klarifikasi Pegawai Menurut Jabatan .....	31
2.1.2.3 Klarifikasi Pegawai Menurut Kualifikasi Pendidikan .....	31
2.1.2.4 Klarifikasi Pegawai Menurut Konsentrasi Pendidikan .....	31
2.1.2.5 Sarana dan Prasarana .....	32
2.1.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ... ..	34
2.1.3.1 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP- El) Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2024 .....	35
2.1.3.2 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0 – 17 Tahun Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2024 .....	36
2.1.3.3 Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021- 2024.....	37
2.1.3.4 Cakupan Penerbitan Akta Kematian Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2024 .....	37
2.1.3.5 Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan Non Muslim Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2024 .....	38
2.1.3.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2024 .....	39
2.2.1.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	47
2.2.1.2 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	50

2.2.2.1	Perumusan Isu – Isu Strategis .....	54
3.2.1	Rumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	59
3.2.2	Penyelarasan Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Dengan Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah Pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 - 2029 .....	61
3.3.1	Perumusan Arah Kebijakan Perangkat Daerah .....	64
3.3.2	Keterkaitan antara Tujuan, sasaran, Strategi dan Kebijakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 – 2029.....	68
3.3.3	Penahapan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	71
4.1.1	Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	73
4.1.2	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025-2030 Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5 - 3406 Tahun 2024.....	97
4.1.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan .....	109
4.1.4	Indikator Kinerja Kunci Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 – 2030 .....	113
4.1.5	Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 – 2030 .....	114
4.1.6	Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 –2030.....	114

## DAFTAR GAMBAR

2.1. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar .....	29
3.2.1 Kerangka keterkaitan antara Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra .....	58
4.1.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.....	72

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) adalah Dokumen Perencanaan Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan pagu indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra merupakan instrumen untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi yang ingin dicapai pada periode rencana jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu institusi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Renstra ini dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Fungsi Renstra adalah sebagai dokumen acuan untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, sebagai dokumen acuan yang mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai, dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai serta sebagai alat untuk kemajuan pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah. Renstra dapat juga berfungsi sebagai alat atau media untuk berkoordinasi dengan pihak lain, selain itu juga untuk mempermudah pencapaian target, strategi dan penggunaan sumber daya yang ada.

Berdasarkan Pasal 272 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan Pembangunan daerah adalah proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang

perlu melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku serta dilaksanakan secara jujur, obyektif, transparan dan inovatif.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana Perangkat daerah terdiri atas : (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra merupakan serangkaian rencana, tindakan dan strategi mendasar yang dibuat bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi, disusun secara sistematis, konsisten, berkesinambungan untuk dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas dalam jangka waktu lima tahun. Dengan demikian penyusunan renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan komitmen antara pimpinan dan seluruh staf dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan berorientasi pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar

Seluruh Dokumen yang merupakan bagian dari system perencanaan pembangunan adalah merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan dokumen- dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antar satu dengan yang lainnya. Demikian halnya dengan dokumen Renstra sebagai salah satu komponen dokumen perencanaan pembangunan daerah. Keterkaitan dimaksud meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan RPJMD, sehingga tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang harus selaras dengan strategi pembangunan daerah,

kebijakan umum dan program dalam rencana kerja indikatif pada RPJMD. Oleh sebab itu prinsip yang mendasari penyusunan perencanaan pembangunan pelayanan administrasi kependudukan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 ini adalah sebagai rencana operasional untuk pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang selaras dengan isu dan permasalahan dibidang administrasi kependudukan.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan proses yang berkelanjutan untuk periode lima tahun yang diturunkan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar terpilih Tahun 2025 – 2029 serta isu – isu strategis bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diperkirakan akan dihadapi pada periode lima tahun ke depan. Oleh karena itu agar renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat responsive terhadap perkembangan situasi yang dinamis, baik dalam aspek politik, ekonomi maupun social budaya maka telah dilakukan revisi baik secara parsial maupun substansial melalui pengembangan sasaran strategis, indicator kinerja sasaran, program dan tahapan – tahapan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Renstra yang telah disusun selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan jangka pendek atau tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja merupakan dokumen acuan operasional Perangkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan 1 (satu) tahun. Pada pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota harus dipastikan bahwa indikator dan prakiraan maju pada penyusunan Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada indicator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan indikatif pada Renstra Perangkat Daerah.

## **1.2. Dasar Hukum**

Dasar Hukum Dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dngan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6573);
  9. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
  10. Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2024 Nomor 6987);
  11. Undang – Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi

- Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 112);
  22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah , dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406

Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat daerah tahun 2025 – 2029.
33. Peraturan Daerah Provinsi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
34. Peraturan Daerah Provinsi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
35. Peraturan Daerah Provinsi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Perencanaan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 322);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 135);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 03 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 1130);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 138);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 129 tahun 2021 tentang Kedudukan, Sususna Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025–2029 disusun dengan maksud untuk menjadi arahan dan acuan serta pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar bersama masyarakat dan *stakeholders* lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang

kependudukan selama periode tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta guna mendukung pelaksanaan amanat pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025– 2029.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar adalah menjelaskan tentang tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang kependudukan yakni menjabarkan kondisi dan prospek perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025–2029 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar adalah :

1. Menjabarkan visi, misi dan program yang tertuang dalam RPJMD 2025 – 2029 ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Membangun komitmen, konsistensi dan kontinuitas perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan; dan
3. Menjadi Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja untuk jangka waktu 5 tahun kedepan.

#### **1.4. Sistematika Penyajian**

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat daerah, maka Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisikan Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, serta sistematika penulisan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Mengenai gambaran umum pelayanan, tugas dan fungsi serta struktur perangkat daerah, sumber daya yang dimiliki dan kinerja pelayanan, Kelompok sasaran layanan, Mitra dalam pemberian layanan, kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab serta

Permasalahan pelayanan dan isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 – 2029

### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Menguraikan Program dan Kegiatan, sub kegiatan berserta kinerja, indicator yang ditujukan pada kelompok sasaran , target dan pagu pendanaan indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Target keberhasilan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran renstra Tahun 2025 – 2029 dan target kinerja melalui indicator indicator kunci (IRK).

### **BAB V PENUTUP**

Menjelaskan penjabaran Renstra lebih lanjut dalam bentuk Renja Perangkat Daerah.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU**  
**STRATEGIS PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN**  
**PENCATATAN SIPIL**

**2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil**

**2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 129 Tahun 2021 merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, meliputi:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan; dan
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Jabatan Fungsional.

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian organisasi, sebagai berikut :

## **I. Kepala**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Fungsi Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait Tugas dan fungsinya.

Sedangkan uraian tugas Kepala Dinas meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. merumuskan kebijakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. menyelenggarakan kebijakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. mengelola perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
- j. mengelola urusan aparatur sipil negara;
- k. menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk;
- l. menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan pencatatan sipil;

- m. menyelenggarakan dan melaksanakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
- n. menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil;
- o. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
- p. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- q. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- r. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **II. Sekretaris**

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administrasitif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur;
- b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup Dinas;

- e. pelaksanaan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
- g. pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kinerja dinas; dan
- h. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan uraian tugas Sekretaris meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur Dinas;
- g. melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- h. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi;
- i. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup Dinas;
- j. melaksanakan penyusunan, penetapan peraturan perundang-undangan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- k. melaksanakan penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
- a. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup Dinas;

- b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- c. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- e. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, aset, serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum adalah :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas; memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- c. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- d. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. melakukan urusan surat menyurat dan tata naskah dinas;
- h. melakukan pengelolaan aset, perlengkapan, dan rumah tangga;
- i. mengoordinir pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
- j. melakukan pengelolaan administrasi perkantoran;
- k. melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- l. melakukan kearsipan dan ekspedisi;
- m. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

- melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar bekerja sama dengan unit kerja yang membidangi pengembangan kompetensi;
- n. melakukan kebijakan pimpinan terkait penegakan disiplin pegawai lingkup Dinas;
  - o. melaksanakan analisa beban kerja dan analisa jabatan lingkup Dinas;
  - p. melakukan analisa kebutuhan pegawai lingkup Dinas;
  - q. memfasilitasi penyusunan laporan kinerja aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
  - r. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
  - s. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - t. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Subbagian Umum, dan Kepegawaian serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - u. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **1. Sub Bagian Perencanaan**

Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja dan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas Kepala Subbagian Perencanaan adalah :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Perencanaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan Dinas;
- g. memfasilitasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
- h. menyusun program dan kegiatan Dinas dalam dokumen perencanaan;
- i. menyusun dokumen evaluasi Dinas;
- j. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Dinas;
- k. melakukan pengelolaan data dan informasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- l. memfasilitasi penjangkaran inovasi Daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi Dinas;
- n. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan anggaran;
- o. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- p. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan perundang- undangan Bidang Kependudukan dan pencatatan sipil
- r. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- s. Melakukan pengarsipan dokumen peraturan perundang – undangan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- t. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Subbagian Perencanaan, serta memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- u. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2. Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi,

verifikasi dan pembukuan. Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan adalah :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. memfasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan keuangan;
- h. melakukan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- i. melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggap pemeriksaan;
- j. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
- k. menyusun laporan keuangan bulanan/semesteran;
- l. menyusun laporan *prognosis* realisasi anggaran;
- m. menyusun laporan keuangan akhir tahun;
- n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- o. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Subbagian Keuangan, serta memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **III. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk**

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pelayanan pendaftaran penduduk.

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- c. pelaksanaan administrasi di bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan uraian tugas Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk adalah :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. merumuskan kebijakan teknis bidang pendaftaran penduduk;
- g. menyusun rencana pelayanan pendaftaran penduduk;
- h. melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk;
- i. menverifikasi berkas identitas penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk;
- j. melaksanakan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- k. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang pendaftaran penduduk;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pendaftaran penduduk;
- m. melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- n. melakukan pelayanan identitas penduduk;
- o. menverifikasi berkas identitas penduduk;
- p. melakukan penerbitan pelayanan identitas penduduk;

- q. melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan identitas penduduk;
- r. mendokumentasikan penerbitan pelayanan identitas penduduk;
- s. melakukan pelayanan pindah datang penduduk;
- t. memverifikasi berkas pindah datang penduduk;
- u. melakukan penerbitan pelayanan pindah datang penduduk;
- v. melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan pindah datang penduduk;
- w. mendokumentasikan penerbitan pelayanan pindah datang penduduk;
- x. melakukan pelayanan pendataan penduduk;
- y. memverifikasi berkas pendataan penduduk;
- z. melakukan penerbitan pelayanan pendataan penduduk;
- aa. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelayanan pendataan penduduk;
- bb. mendokumentasikan penerbitan pelayanan pendataan penduduk.
- cc. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- dd. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- ee. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ff. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- gg. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **IV. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil**

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pelayanan pencatatan sipil.

Fungsi Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas adalah :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pencatatan sipil;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan administrasi di bidang pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pencatatan sipil; dan
- e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun uraian tugas Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil adalah meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagai pedoman pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. merumuskan kebijakan teknis bidang pelayanan pencatatan sipil;
- g. melaksanakan penyusunan rencana pelayanan pencatatan sipil;
- h. melaksanakan pelayanan pencatatan sipil;
- i. memverifikasi berkas kelahiran, perkawinan dan perceraian, akta kematian dan status anak, kewarganegaraan dan kematian;
- j. melaksanakan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- k. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pencatatan kelahiran;
- l. Melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
- m. melakukan pelayanan kelahiran;
- n. melakukan penerbitan pelayanan kelahiran;
- o. menverifikasi berkas kelahiran;
- p. melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan kelahiran;
- q. mendokumentasikan penerbitan pelayanan kelahiran;
- r. melakukan pelayanan perkawinan dan perceraian;
- s. memverifikasi berkas perkawinan dan perceraian;

- t. melakukan penerbitan pelayanan perkawinan dan perceraian;
- u. melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan perkawinan dan perceraian;
- v. mendokumentasikan penerbitan pelayanan perkawinan dan perceraian;
- w. melakukan pelayanan perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian;
- x. memverifikasi berkas perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian;
- y. melakukan penerbitan pelayanan perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian;
- z. melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian;
- aa. mendokumentasikan penerbitan pelayanan perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian.
- bb. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pelayanan pencatatan sipil;
- cc. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- dd. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ee. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ff. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**V. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di pimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- c. pelaksanaan administrasi di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- d. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
- e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Adapun Uraian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan adalah :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagai pedoman pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bidang Pengelolaan Informasi
- d. Administrasi Kependudukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. merumuskan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- h. melaksanakan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan;
- i. melaksanakan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- k. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan peralatan sistem informasi administrasi kependudukan, infrastruktur perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan komunikasi data lokal, privat dan antarmuka, serta pengembangan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan, aplikasi antarmuka sidik jari otomatis (afis) berlisensi;

- l. melakukan pengelolaan peralatan sistem informasi administrasi kependudukan, infrastruktur perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan komunikasi data lokal, privat dan antarmuka, serta pengembangan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan, aplikasi antarmuka, dan sidik jari otomatis (afis) berlisensi;
- m. melakukan koordinasi pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan;
- n. mengembangkan sistem informasi administrasi kependudukan berbasis teknologi yang dapat diakses masyarakat untuk kepentingan publik;
- o. melakukan implementasi sistem informasi administrasi kependudukan (pemeliharaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan jaringan komunikasi data);
- p. melakukan *Maintenance Software* dan jaringan komunikasi data;
- q. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- r. melakukan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- s. melakukan koordinasi pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan
- t. menghimpun dan menyusun serta menerbitkan data-data demografi sesuai dengan wilayah secara periodik;
- u. menyiapkan data agregat kepala keluarga dan daftar penduduk pemilih potensi pemilu serta laporan administrasi kependudukan;
- v. melakukan pencocokan dan penelitian buku induk penduduk;
- w. melaksanakan kegiatan implementasi sistem administrasi kependudukan;
- x. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- y. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- z. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- aa. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan

memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- bb. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **VI. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan**

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan di pimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Kepala Bidang Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- c. pelaksanaan administrasi di bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- d. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; dan
- e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Adapun Uraian Tugas Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan sebagai pedoman pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- g. melaksanakan kebijakan teknis kerjasama administrasi

- kependudukan;
- h. melaksanakan koordinasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
  - i. melaksanakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  - j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
  - k. melaksanakan pelayanan pemanfaatan data kependudukan meliputi keamanan dan pengamanan hak akses, pemanfaatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk elektronik dan data kependudukan, lembaga pengguna serta profil kependudukan;
  - l. melaksanakan inovasi pelayanan penerbitan dokumen kependudukan (kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik dan akta catatan sipil), percepatan layanan pendataan penduduk, layanan akta kelahiran dan kematian serta konsolidasi database dan inovasi dukungan layanan dengan pengembangan sarana dan prasarana, aparatur, mekanisme layanan, komponen sistem informasi administrasi kependudukan, data kependudukan dan tingkat partisipasi masyarakat.
  - m. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
  - n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
  - o. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - p. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - q. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

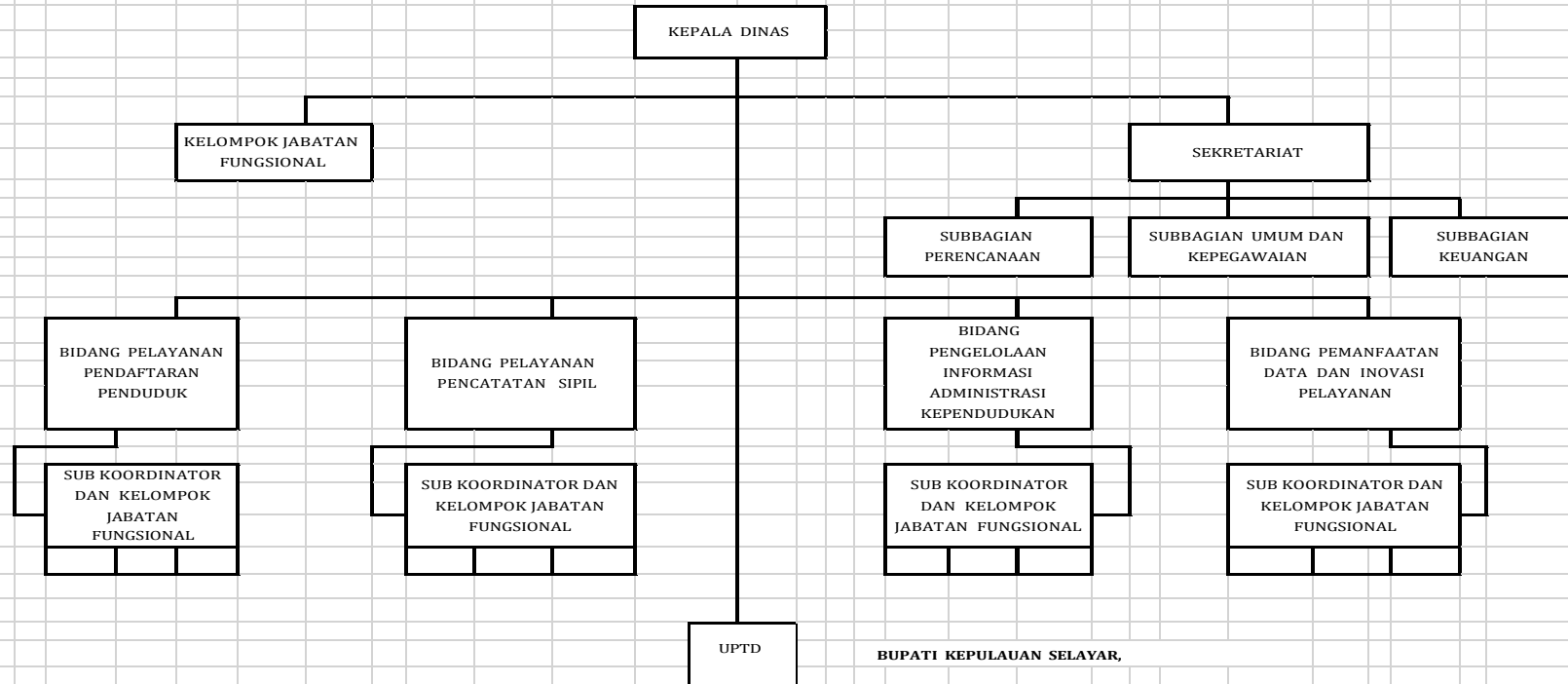
## **VII. JABATAN FUNGSIONAL**

- (1) Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan jabatan fungsional pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang dipimpin oleh sub koordinator yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.

Sub Koordinator mempunyai tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan.

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
 NOMOR 129 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI, SERTA  
 TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

**STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

**MUH. NATSIR ALI**

### 2.1.2. Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Sumber daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur yang terpenting dalam suatu organisasi. Kemampuan sumber daya dipengaruhi oleh beberapa faktor antar lain tingkat pendidikan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki sumber daya manusia sebanyak 59 orang sesuai kondisi Awal 2025, terdiri dari 21 orang berstatus PNS, 1 Orang berstatus PPPK dan 37 Pegawai Non PNS, dengan klasifikasi menurut golongan/ruang, tingkat pendidikan, dan jabatan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.1.2.1**  
**Klasifikasi Pegawai Menurut Golongan**

<b>NO</b>	<b>Golongan/ Ruang</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Golongan IV/c	1 Orang
2.	Golongan IV/b	1 Orang
3.	Golongan IV/a	6 Orang
4.	Golongan III/d	4 Orang
5.	Golongan III/c	2 Orang
6.	Golongan III/b	3 orang
7.	Golongan III/a	7 orang
8.	Golongan II/d	1 orang
9.	Golongan II/c	0 orang
10.	Golongan II/b	0 orang
11.	Golongan II/a	1 orang
12.	Pegawai Non PNS	37 orang
<b>JUMLAH</b>		<b>63 Orang</b>

Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar didominasi Pegawai Non-PNS yaitu sebanyak 68,73 %, sementara PNS hanya 41,27 % pada bulan Juni 2025.

**Tabel 2.1.2.2****Klasifikasi Pegawai Menurut Jabatan**

<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>
Eselon II-b	1 Orang
Eselon III-a	1 Orang
Eselon III-b	4 Orang
Eselon IV-a	8 Orang
Staf PNS	12 Orang
Staf Non PNS	37 orang
Jumlah	63 orang

**Tabel 2.1.2.3****Klarifikasi Pegawai Menurut Kualifikasi Pendidikan**

<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
Sarjana S2	7 Orang
Sarjana S1	27 Orang
Sarjana Muda	1 Orang
SMA	27 Orang
SMP	1 Orang
Jumlah	63 Orang

**Tabel 2.1.2.4.****Klarifikasi Pegawai Menurut Konsentrasi Pendidikan**

<b>Konsentrasi Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
S2 Administrasi Publik	1 Orang
S2 Manajemen	6 Orang
S1 Ekonomi	8 Orang
S1 Sosiologi	1 Orang
S1 Pertanian	1 Orang
S1 Perikanan	4 Orang
S1 Teknik	2 Orang
S1 Komputer	3 Orang
S1 Ilmu Pendidikan	2 Orang
S1 Administrasi Pemerintahan	2 Orang
S1 Hukum	1 Orang
S1 Sains	1 Orang
D3 Komputer	1 Orang
SMA Sederajat	27 Orang
SMP Sederajat	1 Orang
Jumlah	63 orang

- **Sarana dan Prasarana**

Gambaran Pelayanan Pemerintah tidak dapat dipungkiri bahwa sarana dan prasarana adalah faktor yang sangat menentukan dalam rangka terciptanya pelayanan yang prima. Kondisi saat ini sarana dan prasarana dalam mendukung fungsi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1.2.5**  
**Sarana dan prasarana**

NO.	NAMA BARANG	KONDISI		JUMLAH BARANG
		BAIK	RB/H	
1	Mobil	2	-	2
2	Sepeda Motor	12	2	14
3	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	-	1	1
4	Mesin Ketik Listrik	-	1	1
5	Lemari besi	8	-	8
6	Rak Besi	7	-	7
7	Brangkas	1	-	1
8	Mesin Absensi	1	-	1
9	Mesin Laminating	-	1	1
10	Mesin Potong KTP	-	1	1
11	Mesin Pemotong Rumput	-	1	1
12	Flasdisk	-	2	2
13	Hardiks	4	-	4
14	Signature Pad	3	-	3
15	Lemari Kayu	3	-	3
16	Kursi Besi	2	-	2
17	Kursi Kayu	2	-	2
18	Meja Rapat	1	-	1
19	Meja Panjang	1	-	1
20	Kursi Tamu	2	-	2
21	Meja 1 Biro	9	5	14
22	Meja ½ Biro	7	22	29
23	Kursi Rapat	-	1	1
24	Kursi Putar	-	22	22
25	Kursi Lipat	-	15	15
26	Meja Komputer	-	4	4
27	AC	10	9	19
28	Dispenser	1	-	1
29	Televisi	1	-	1
30	Kulkas	2	-	2
31	P.C Unit / Komputer PC	16	24	40
32	Laptop	24	12	36
33	Note Book	-	2	2
34	Monitor	-	6	6
35	Printer	13	33	46

36	Printer KIA	2	-	2
37	Printer KTP	4	-	4
38	Scanner	-	8	8
39	UPS	3	13	16
40	Peralatan Personal Komputer (Baterai UPS)	-	6	6
41	Server	3	3	6
42	Genset	-	6	6
43	Peralatan Jaringan lainnya	-	4	4
44	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1	2
45	Meja kerja Pejabat Eselon III	2	1	3
46	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	2	5
47	Kursi kerja Pejabat Eselon V	-	4	4
48	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	95	12	107
49	Kursi Tamu diruangan Pejabat Eselon II	2	1	3
50	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	-	2	2
51	Layar Film/Proyektor	-	1	1
52	Proyektor + attachment	1	-	1
53	Camera Eletronic	2	6	8
54	Handphone	1	-	1
55	Alat Mobile E-KTP Set	1	-	1
56	Scanner Iris Mata	1	-	1
57	Fingerprint	1	-	1
	<b>Jumlah</b>	<b>254</b>	<b>234</b>	<b>488</b>

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa sarana dan prasarana belum memadai untuk dijadikan standar pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat/Stakeholder.

### **2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Penyelenggaraan urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan, menciptakan data dan informasi kependudukan yang akurat dan akuntabel, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, maka kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar selama tahun 2021 s/d 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 2.1.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan fungsi SKPD	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Tahun ke..				Realisasi tahun ke...				Tingkat Capaian Tahun ke...			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Penerbitan Kartu Keluarga (KK)			%	100	100	100	100	100	100	99,84	100	100	100	99,84	100
2.	Persentase Penerbitan KTP-Elektronik			%	96	97	97	98	93,70	91,40	92,77	94,27	97,60	94,23	95,64	96,19
3.	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)			%	30	32	35	36	43,24	50,27	54,08	52,64	144,13	157,09	154,51	146,22
4.	Persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil			%	93,75	94	94	94,50	71,98	96,60	86,96	98,23	76,78	102,77	92,51	103,95
5.	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama			%	100	76,92	76,92	88,46	36	44,44	61,54	62,96	36	57,77	80,00	71,17
6.	Persentase ketersediaan data profil kependudukan			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil			%	83	78,75	73,6	74,6	87,43	85,56	88,65	84,54	105,34	108,65	120,45	113,32

**2.1.3.1. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)**

Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk elektronik merupakan perbandingan dari jumlah kartu tanda penduduk elektronik yang diterbitkan di bagi dengan jumlah penduduk wajib KTP. Cakupan penerbitan KTP-el di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 sebesar 93,70 persen dan menurun pada tahun 2022 yakni sebesar 91,40 persen terus meningkat sampai tahun 2024 yang mencapai 94,27 persen. Ini menunjukkan bahwa kinerja dari dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil sudah termasuk kategori sangat baik dalam hal penerbitan KTP-el, hal ini disebabkan adanya peraturan perundang- undangan yang mendukung kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan terlaksananya koordinasi secara sinergi antara stakeholder terkait pengguna layanan. Cakupan Penerbitan KTP-el dapat dilihat selengkapnya pada tabel berikut :

**Tabel 2.1.3.1**

Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)  
Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar  
Tahun 2021 – 2024

No	Kecamatan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1.	Benteng	16.379	16.604	16.848	17.118
2.	Bontoharu	10.332	10.224	10.734	11.034
3.	Bontomatene	10.216	10.107	10.183	10.288
4.	Bontomanai	10.153	10.026	10.199	10.293
5.	Bontosikuyu	11.119	10.943	11.409	11.680
6.	Pasimasunggu	5.921	5.797	6.036	6.198
7.	Pasimarannu	7.139	7.069	7.211	7.465
8.	Takabonerate	8.469	8.207	8.860	9.273
9.	Pasilambena	5.105	5.408	5.284	5.531
10.	Pasimasunggu Timur	5.408	5.387	5.599	5.834
11.	Buki	4.942	4.977	5.104	5.188
<b>Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) (%)</b>		<b>95.183 (93,70 %)</b>	<b>94.749 (91,40 %)</b>	<b>97.467 (92,77 %)</b>	<b>100.002 (94,27%)</b>

*Sumber Data : Bidang Pendaftaran Penduduk*

**2.1.3.2. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 0 – 17 Tahun**

Cakupan Akta kelahiran 0 – 17 Tahun merupakan perbandingan jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran 0 – 17 dibagi dengan jumlah penduduk usia 0 – 17 Tahun. Cakupan penerbitan akta kelahiran Ousia 0 – 17 Tahun di Kabupaten

Kepulauan Selayar tahun 2021 sebesar 78,72 persen dan terus menurun meningkat sampai tahun 2024 yang mencapai 93,25 persen. Hal ini disebabkan penerbitan akta kelahiran dipermudah melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) terintegrasi. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.1.3.2**

Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 0 – 17 Tahun Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2024

No	Kecamatan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1.	Benteng	6.219	6.309	6.618	6.521
2.	Bontoharu	4.205	3.922	4.238	4.283
3.	Bontomatene	2.984	2.859	3.049	2.982
4.	Bontomanai	3.788	3.455	3.603	3.524
5.	Bontosikuyu	4.400	4.016	4.247	4.222
6.	Pasimasunggu	2.336	2.296	2.443	2.490
7.	Pasimarannu	2.611	2.617	2.798	2.926
8.	Takabonerate	3.101	3.288	4.062	4.141
9.	Pasilambena	2.200	2.203	2.373	2.452
10.	Pasimasunggu Timur	1.809	1.776	1.888	1.931
11.	Buki	1.769	1.620	1.710	1.683
<b>Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran (%)</b>		<b>35.422 (78,72 %)</b>	<b>34.361 (89,80 %)</b>	<b>37.029 (91,45 %)</b>	<b>37.155 (93,25 %)</b>

*Sumber Data : Bidang Pencatatan Sipil*

### 2.1.3.3. Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

Cakupan kartu Identitas Anak (KIA) adalah perbandingan jumlah anak usia 0 – 17 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) dibagi dengan jumlah anak usia 0 – 17 Tahun. Cakupan persentase penerbitan Kartu Identitas Anak pada Tahun 2021 adalah sebesar 43,24 persen dan meningkat terus hingga tahun 2023 dengan persentase sebesar 54,08 persen. Namun setelah tahun 2024 penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) menurun sebesar 1,44 persen sehingga penerbitan Kartu Identitas Anak hanya sebesar 52,64 persen. Hal ini disebabkan karena tidak cukupnya ketersediaan anggaran untuk pengadaan ribbon kartu identitas anak (KIA).

**Tabel 2.1.3.3**

Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak(KIA) Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2024

No	Kecamatan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1.	Benteng	2.779	3.127	3.470	3387
2.	Bontoharu	2.248	2.127	2.428	2327
3.	Bontomatene	2.154	1.993	2.136	1972
4.	Bontomanai	2.252	2.188	2.345	2240
5.	Bontosikuyu	2.133	1.959	2.188	2084
6.	Pasimasunggu	1.126	1.227	1.339	1281
7.	Pasimarannu	1.140	1.430	1.583	1501
8.	Takabonerate	770	1.188	1.957	1935
9.	Pasilambena	202	505	663	614
10.	Pasimasunggu Timur	794	900	1.023	987
11.	Buki	1.151	1.150	1.225	1157
<b>Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) (%)</b>		<b>16.748 (43,24% )</b>	<b>17.794 (50,27 %)</b>	<b>20.327 (54,08 %)</b>	<b>19.485 (52,64 %)</b>

#### 2.1.3.4. Cakupan Penerbitan Akta Kematian

Cakupan Akta Kematian adalah perbandingan jumlah kematian yang diterbitkan dengan jumlah kematian yang dilaporkan. Cakupan persentase akta kematian pada tahun 2021 adalah sebesar 65,23 persen dan meningkat pada tahun 2022 sebesar 100 persen kemudian menurun pada tahun 2023 sebesar 93,75 persen dan meningkat lagi setelah tahun 2024 sebesar 99,96 persen.

**Tabel. 2.1.3.4**

Cakupan Penerbitan Akta Kematian Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2024

No	Kecamatan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1.	Benteng	39	82	120	166
2.	Bontoharu	19	55	43	60
3.	Bontomatene	81	49	51	58
4.	Bontomanai	17	71	57	84
5.	Bontosikuyu	67	64	42	54
6.	Pasimasunggu	2	13	23	16
7.	Pasimarannu	2	24	16	48

8.	Takabonerate	2	40	27	26
9.	Pasilambena	3	60	8	18
10.	Pasimasunggu Timur	5	33	11	17
11.	Buki	20	34	22	37
<b>Cakupan Penerbitan Akta Kematian (%)</b>		<b>257 (65,23 %)</b>	<b>525 (100 %)</b>	<b>420 (93,75 %)</b>	<b>584 (99,66 %)</b>

### 2.1.3.5. Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan Non-Muslim

Cakupan Akta Perkawinan adalah perbandingan jumlah perkawinan non-muslim yang diterbitkan dengan jumlah perkawinan non-muslim yang dilaporkan. Cakupan akta perkawinan pada penduduk non-muslim pada tahun 2021 adalah sebesar 1 kutipan dan meningkat menjadi 5 kutipan pada tahun 2022 dan 6 kutipan pada tahun 2023 hingga tahun 2024 hanya sebesar 4 kutipan.

**Tabel. 2.1.3.5**

Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan Non-Muslim Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2024

No	Kecamatan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1.	Benteng	1	3	5	3
2.	Bontoharu	-	-	-	-
3.	Bontomatene	-	-	1	-
4.	Bontomanai	-	-	-	-
5.	Bontosikuyu	-	2	-	1
6.	Pasimasunggu	-	-	-	-
7.	Pasimarannu	-	-	-	-
8.	Takabonerate	-	-	-	-
9.	Pasilambena	-	-	-	-
10.	Pasimasunggu Timur	-	-	-	-
11.	Buki	-	-	-	-
<b>Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan Non-Muslim</b>		<b>1 (100 %)</b>	<b>5 (100 %)</b>	<b>6 (100 %)</b>	<b>4 (100 %)</b>

**Tabel 2.1.3.6**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

**Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 s/d 2024**

No	Program/Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke				Realisasi Pada Tahun Ke				Rasio Pada Tahun Ke				Rata-Rata Pertambahan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>4,178,407,100</b>	<b>3,244,942,600</b>	<b>3,207,538,000</b>	<b>3,359,971,144</b>	<b>4,007,401,959</b>	<b>3,125,002,050</b>	<b>3,136,252,251</b>	<b>3,486,184,755</b>					<b>13,990,858,844</b>	<b>13,754,841,015</b>
	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA</b>	<b>391,661,000</b>	<b>50,707,000</b>	<b>43,216,000</b>	<b>49,616,000</b>	<b>390,664,600</b>	<b>50,496,600</b>	<b>43,206,000</b>	<b>48,719,100</b>					<b>535,200,000</b>	<b>533,086,300</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25,450,000	25,562,000	13,026,000	15,366,000	25,297,800	25,542,000	13,026,000	15,174,300	0.99	1.00	1.00	0.99	79,404,000	79,040,100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15,000,000	3,660,000	5,850,000	5,000,000	15,000,000	3,660,000	5,850,000	4,940,500	1.00	1.00	1.00	0.99	29,510,000	29,450,500
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	4,590,000	5,000,000	5,000,000	-	4,450,000	5,000,000	4,847,800	0.00	0.97	1.00	0.97	14,590,000	14,297,800
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3,000,000	-	5,000,000	5,000,000	3,000,000	-	5,000,000	4,837,800	1.00	0.00	1.00	0.97	13,000,000	12,837,800
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	5,000,000	4,969,800	0.00	0.00	1.00	0.99	10,000,000	9,969,800
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,340,000	5,500,000	4,340,000	6,250,000	5,340,000	5,500,000	4,330,000	6,181,500	1.00	1.00	1.00	0.99	21,430,000	21,351,500
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	342,871,000	11,395,000	5,000,000	8,000,000	342,026,800	11,344,600	5,000,000	7,767,400	1.00	1.00	1.00	0.97	367,266,000	366,138,800
	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>2,694,326,000</b>	<b>2,435,222,000</b>	<b>2,335,775,000</b>	<b>2,309,298,544</b>	<b>2,551,585,000</b>	<b>2,320,246,500</b>	<b>2,273,891,170</b>	<b>2,508,454,856</b>					<b>9,774,621,544</b>	<b>9,654,177,526</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	77,304,000	-	-	-	77,304,000	-	-	-	1.00	0.00	0.00	0.00	77,304,000	77,304,000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	6,000,000	5,000,000	-	-	6,000,000	4,779,900	0.00	0.00	1.00	0.96	11,000,000	10,779,900
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	17,000,000	-	6,000,000	5,000,000	17,000,000	-	5,997,000	4,808,900	1.00	0.00	1.00	0.96	28,000,000	27,805,900
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	22,000,000	22,500,000	13,874,000	14,076,000	22,000,000	22,500,000	13,874,000	14,016,800	1.00	1.00	1.00	1.00	72,450,000	72,390,800

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	17,000,000	9,800,000	6,000,000	5,000,000	17,000,000	9,790,000	6,000,000	4,823,000	1.00	1.00	1.00	0.96	37,800,000	37,613,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,000,000	4,500,000	6,351,000	11,239,400	5,000,000	4,410,000	6,351,000	10,632,100	1.00	0.98	1.00	0.95	27,090,400	26,393,100
penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,556,022,000	2,398,422,000	2,297,550,000	2,268,983,144	2,413,281,000	2,283,546,500	2,235,669,170	2,469,394,156	0.94	0.95	0.97	1.09	9,520,977,144	9,401,890,826
<b>ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>-</b>	<b>7,250,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>4,921,000</b>	<b>-</b>	<b>6,650,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>4,751,000</b>					<b>17,171,000</b>	<b>16,401,000</b>
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	-	7,250,000	5,000,000	4,921,000	-	6,650,000	5,000,000	4,751,000	0.00	0.92	1.00	0.97	17,171,000	16,401,000
<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>-</b>	<b>20,450,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>-</b>	<b>20,450,000</b>	<b>9,990,000</b>	<b>4,993,000</b>					<b>35,450,000</b>	<b>35,433,000</b>
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	16,450,000	5,000,000	5,000,000	-	16,450,000	4,990,000	4,993,000	0.00	1.00	1.00	1.00	26,450,000	26,433,000
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	4,000,000	5,000,000	-	-	4,000,000	5,000,000	-	0.00	1.00	1.00	0.00	9,000,000	9,000,000
<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>372,162,000</b>	<b>510,712,000</b>	<b>362,250,000</b>	<b>231,808,000</b>	<b>372,039,108</b>	<b>510,712,000</b>	<b>361,292,762</b>	<b>230,947,700</b>					<b>1,476,932,000</b>	<b>1,474,991,570</b>
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	364,802,000	200,000,000	200,000,000	211,908,000	364,679,108	200,000,000	199,821,512	211,096,800	1.00	1.00	1.00	1.00	976,710,000	975,597,420
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,500,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	1,500,000	4,000,000	4,000,000	3,951,100	1.00	1.00	1.00	0.99	13,500,000	13,451,100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	292,212,000	142,350,000	-	-	292,212,000	141,571,250	-	0.00	1.00	0.99	0.00	434,562,000	433,783,250
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	8,000,000	10,700,000	8,780,000	-	8,000,000	10,700,000	8,779,800	0.00	1.00	1.00	1.00	27,480,000	27,479,800
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,860,000	6,500,000	5,200,000	7,120,000	5,860,000	6,500,000	5,200,000	7,120,000	1.00	1.00	1.00	1.00	24,680,000	24,680,000
<b>PENGADAAN BARANG MILIM DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>544,376,000</b>	<b>44,900,000</b>	<b>44,000,000</b>	<b>344,000,000</b>	<b>528,646,870</b>	<b>43,610,000</b>	<b>43,944,000</b>	<b>324,327,700</b>					<b>977,276,000</b>	<b>940,528,570</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	544,376,000	-	44,000,000	344,000,000	528,646,870	-	43,944,000	324,327,700	0.97	0.00	1.00	0.94	932,376,000	896,918,570
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	36,600,000	-	-	-	35,310,000	-	-	0.00	0.96	0.00	0.00	36,600,000	35,310,000
Pengadaan Mebel	-	8,300,000	-	-	-	8,300,000	-	-	0.00	1.00	0.00	0.00	8,300,000	8,300,000
<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>105,422,100</b>	<b>118,388,600</b>	<b>288,737,000</b>	<b>266,388,600</b>	<b>97,540,381</b>	<b>117,131,950</b>	<b>280,388,581</b>	<b>247,073,707</b>					<b>778,936,300</b>	<b>742,134,619</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	47,414,100	30,000,000	23,068,000	10,000,000	45,556,600	30,000,000	23,068,000	9,899,000	0.96	1.00	1.00	0.99	110,482,100	108,523,600

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58,008,000	63,188,600	81,550,000	73,075,000	51,983,781	62,179,350	74,405,581	54,917,507	0.90	0.98	0.91	0.75	275,821,600	243,486,219
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	25,200,000	184,119,000	183,313,600	-	24,952,600	182,915,000	182,257,200	0.00	0.99	0.99	0.99	392,632,600	390,124,800
<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>70,460,000</b>	<b>85,013,000</b>	<b>133,560,000</b>	<b>158,860,000</b>	<b>66,926,000</b>	<b>82,805,000</b>	<b>133,529,738</b>	<b>126,661,692</b>					<b>447,893,000</b>	<b>409,922,430</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	38,630,000	21,883,000	18,200,000	18,200,000	35,120,000	21,840,000	18,200,000	18,181,400	0.91	1.00	1.00	1.00	96,913,000	93,341,400
Penyediaan Jasa, Biaya pemeliharaan dan Paja, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	21,840,000	38,630,000	77,260,000	72,260,000	21,816,000	36,630,000	77,236,249	71,898,000	1.00	0.95	1.00	0.99	209,990,000	207,580,249
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,990,000	14,000,000	7,270,000	35,340,000	9,990,000	14,000,000	7,270,000	3,533,099	1.00	1.00	1.00	0.10	66,600,000	34,793,099
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	10,500,000	30,830,000	33,060,000	-	10,335,000	30,823,489	33,049,193	0.00	0.98	1.00	1.00	74,390,000	74,207,682
<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>138,849,000</b>	<b>442,440,000</b>	<b>194,562,000</b>	<b>241,522,000</b>	<b>137,338,500</b>	<b>442,241,972</b>	<b>194,536,850</b>	<b>241,403,420</b>					<b>321,629,000</b>	<b>321,420,920</b>
<b>PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>118,065,000</b>	<b>114,440,000</b>	<b>44,562,000</b>	<b>44,562,000</b>	<b>117,990,500</b>	<b>114,420,000</b>	<b>44,562,000</b>	<b>44,448,420</b>					<b>321,629,000</b>	<b>321,420,920</b>
Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	39,656,000	87,800,000	-	-	39,656,000	87,800,000	-	-	1.00	1.00	0.00	0.00	127,456,000	127,456,000
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Adminstrasi Kependudukan	-	12,550,000	-	-	-	12,530,000	-	-	0.00	1.00	0.00	0.00	12,550,000	12,530,000
Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	52,000,000	14,090,000	-	-	51,997,500	14,090,000	-	-	1.00	1.00	0.00	0.00	66,090,000	66,087,500
Penyusunan Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Pendaftaran Penduduk	-	-	44,562,000	44,562,000	-	-	44,562,000	44,448,420	0.00	0.00	1.00	1.00	89,124,000	89,010,420
Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	26,409,000	-	-	-	26,337,000	-	-	-	1.00	0.00	0.00	0.00	26,409,000	26,337,000
<b>PENATAAN PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>-</b>	<b>75,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					<b>75,000,000</b>	<b>75,000,000</b>

	Pengadaan Dokumen Kependudukan Selain Blangko KTP-E, Formulir, Buku Terkait Pendaftaran Penduduk	-	75,000,000	-	-	-	75,000,000	-	-	0.00	1.00	0.00	0.00	75,000,000	75,000,000
<b>PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK</b>		<b>20,784,000</b>	<b>253,000,000</b>	<b>150,000,000</b>	<b>196,960,000</b>	<b>19,348,000</b>	<b>252,821,972</b>	<b>149,974,850</b>	<b>196,955,000</b>					<b>620,744,000</b>	<b>619,099,822</b>
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	8,284,000	253,000,000	150,000,000	196,960,000	6,848,000	252,821,972	149,974,850	196,955,000	0.83	1.00	1.00	1.00	608,244,000	606,599,822
	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	12,500,000	-	-	-	12,500,000	-	-	-	1.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000	12,500,000
<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>		<b>15,436,000</b>	<b>246,991,400</b>	<b>41,640,000</b>	<b>41,460,000</b>	<b>15,276,200</b>	<b>246,381,400</b>	<b>41,625,000</b>	<b>41,425,400</b>						
<b>PELAYANAN PENCATATAN SIPIL</b>		<b>-</b>	<b>66,991,400</b>	<b>41,640,000</b>	<b>41,460,000</b>	<b>-</b>	<b>66,384,000</b>	<b>41,625,000</b>	<b>41,425,400</b>					<b>150,091,400</b>	<b>304,964,000</b>
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	-	53,448,200	-	-	-	52,843,000	-	-	0.00	0.99	0.00	0.00	53,448,200	52,843,000
	Penyusunan tata Cara Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	-	-	41,640,000	41,460,000	-	-	41,625,000	41,425,400	0.00	0.00	1.00	0.99	83,100,000	83.050.400
	Peningkatan dan Pelayanan Pencatatan Sipil	-	13,543,200	-	-	-	13,541,000	-	-	0.00	1.00	0.00	0.00	13,543,200	13,541,000
<b>PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL</b>		<b>15,436,000</b>	<b>180,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15,276,200</b>	<b>179,997,400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					<b>195,436,000</b>	<b>195,273,600</b>
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	15,436,000	180,000,000	-	-	15,276,200	179,997,400	-	-	0.99	1.00	0.00	0.00	195,436,000	195,273,600
<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINSTRASI KEPENDUDUKAN</b>		<b>105,398,000</b>	<b>86,199,000</b>	<b>38,000,000</b>	<b>17,374,000</b>	<b>104,598,400</b>	<b>85,392,377</b>	<b>37,983,524</b>	<b>17,316,600</b>						
<b>PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN</b>		<b>53,398,000</b>	<b>61,599,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52,602,800</b>	<b>61,202,577</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					<b>114,997,000</b>	<b>113,805,377</b>
	Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	46,000,000	19,800,000	-	-	45,299,400	19,403,577	-	-	0.98	0.98	0.00	0.00	65,800,000	64,702,977
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	7,398,000	41,799,000	-	-	7,303,400	41,799,000	-	-	0.99	1.00	0.00	0.00	49,197,000	49,102,400

<b>PENATAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINSTRASI KEPENDUDUKAN</b>	-	-	12,000,000	20,825,000	-	-	11,884,000	20,470,387					32,825,000	32,354,387
Penyusunan tata Cara Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	12,000,000	20,825,000	-	-	11,884,000	20,470,387	0.00	0.00	0.99	0.98	32,825,000	32,354,387
<b>PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	52,000,000	24,600,000	38,000,000	17,374,000	51,995,600	24,189,800	37,983,524	17,316,600					169,604,000	168,965,724
Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	52,000,000	24,600,000	38,000,000	17,374,000	51,995,600	24,189,800	37,983,524	17,316,600	1.00	0.98	1.00	1.00	131,974,000	131,485,524
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	-	-	17,630,000	20,000,000	-	-	17,573,200	19,907,000	0.00	0.00	1.00	1.00	37,630,000	37,480,200
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	-	10,746,000	24,000,000	11,630,000	-	10,746,000	23,999,999	11,412,400						
<b>PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	-	10,746,000	24,000,000	11,630,000	-	10,746,000	23,999,999	11,412,400					46,376,000	46,158,399
Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	-	10,746,000	-	-	-	10,746,000	-	-	0.00	1.00	0.00	0.00	10,746,000	10,746,000
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan	-	-	24,000,000	11,630,000	-	-	23,999,999	11,412,400	0.00	0.00	1.00	0.98	35,630,000	35,412,399

Tabel di atas menampilkan data anggaran dan realisasi lima program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Tahun 2021 – 2024. Secara umum, rasio antara pagu anggaran dan realisasi menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang cukup tinggi hampir pada semua program.

Secara keseluruhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan manajemen anggaran yang baik dengan tingkat realisasi yang tinggi meskipun terdapat tren penurunan pada alokasi beberapa program yang perlu dicermati pada perencanaan kedepan.

Dari tabel di atas juga menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar antara Tahun 2021 -2024 cukup baik dengan rata-rata penyerapan anggaran diatas 97 %. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah baik. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah wajar, pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja yang cukup maksimal meskipun belum mencapai target disebabkan karena ketersediaan pagu anggaran yang belum cukup memadai.

#### **2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Kelompok sasaran layanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kepulauan Selayar adalah seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar baik masyarakat di Kecamatan Daratan maupun di Kecamatan Kepulauan sebagai pengguna layanan. Dalam rangka kelancaran tugas pokok dan fungsinya, Dinas kependudukan menjalin kerjasama dan koordinasi dengan pihak di Kecamatan maupun Desa.

Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai pengguna layanan berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik, cepat dan gratis dengan kata lain pelayanan yang prima sebagaimana tercantum dalam tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Selain itu pelayanan gratis terkait pengurusan administrasi kependudukan terdapat dalam kebijakan yang

dikeluarkan oleh Kemedagri dan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang mengatur bahwa pelayanan administrasi kependudukan tidak boleh dipungut biaya.

#### **2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan**

Dalam pemberian layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kepulauan Selayar dalam beberapa layanan bekerjasama dengan beberapa perangkat daerah dan lembaga peradilan yang terikat dalam perjanjian kerjasama dalam hal pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP Elektronik dalam lingkup OPDnya masing-masing dan lembaga. Perangkat Daerah yang telah melakukan kerjasama dengan perjanjian kerjasama yaitu Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kecamatan Bontomatene. Sedangkan Lembaga Peradilan yang bekerjasama atau bermitra dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik adalah Pengadilan Agama Selayar Kelas II.

Selain itu dalam melakukan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar bermitra dengan semua kecamatan baik di daratan maupun di kepulauan untuk melakukan pelayanan administrasi kependudukan untuk memenuhi hak-hak administrasi kependudukan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Dengan adanya mitra kerjasama dengan semua perangkat daerah maka semua masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar bisa mendapatkan akses pada semua pelayanan public baik dari segi pelayanan kesehatan maupun bantuan sosial.

## **2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

### **2.2.1. Permasalahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Permasalahan merupakan suatu persoalan yang harus diselesaikan dengan kata lain masalah adalah suatu kesenjangan antara kenyataan (realita) dengan suatu yang diharapkan dengan baik (ideal) agar tercapai visi dan misi serta tujuan dengan hasil yang maksimal.

Untuk mencapai Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan merupakan landasan dan acuan bagi perangkat daerah untuk menyusun rencana strategis (Renstra) maka setiap Perangkat Daerah harus mengidentifikasi permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh Perangkat daerah. Selanjutnya permasalahan tersebut diidentifikasi dan dianalisis untuk menentukan strategi dan program untuk pencapaian Visi dan Misi tersebut.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun permasalahan serta factor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan dan pencapaian kinerja pelayanan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2.1.1**  
**Permasalahan dan Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas**  
**Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar**

<b>Visi : "Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera"</b>				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan PD Disdukpencahil	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Misi – 1 : Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif.	1. Belum seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki dokumen kependudukan yang lengkap, valid dan akurat  2. Penyelenggaraan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang belum optimal	Sosialisasi yang dilaksanakan belum sampai tingkat pedesaan di wilayah kepulauan  • Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan  • Ketersediaan SDM pegawai yang tidak memadai dan tidak merata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memaksimalkan pelaksanaan sosialisasi</li> <li>• Melaksanakan pelayanan keliling administrasi kependudukan (jemput Bola)</li> <li>• Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang cukup dan memadai</li> <li>• Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM</li> </ul>

		<p>3. Belum meratanya layanan kependudukan ke kepulauan akibat factor geografis dan keberadaan jaringan internet</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya biaya transportasi disetiap desa terutama di kecamatan yang terdiri dari beberapa pulau-pulau kecil yang terpisahkan dari ibu kota kecamatan</li> <li>• Masih belum tersedianya jaringan internet untuk akses layanan adminduk di beberapa desa terpencil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan budget/dan transportasi untuk pemenuhan layanan adminduk</li> <li>• Pemasangan jaringan internet disetiap desa untuk pelayanan adminduk secara menyeluruh</li> </ul>
		<p>4. Masih rendahnya pemanfaatan data kependudukan</p>	<p>Pemanfaatan data kependudukan oleh Instansi belum optimal</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya pemahaman Instansi/Opd terhadap pentingnya data kependudukan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan untuk menunjang pembangunan dan kesejahteraan warga,</li> <li>• Lambatnya respon dari Dirjen Dukcapil terkait PKS dan pemberian User sehingga memperlambat proses pemanfaatan data kependudukan</li> </ul>

Dari hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi dan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar beserta dengan factor – factor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan dan pencapaian kinerja pelayanan, maka dapat dipetakan pokok permasalahan yang sesuai dengan bidang teknis pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2.1.2**

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Belum seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki dokumen kependudukan yang lengkap, valid dan akurat	Sosialisasi belum dilaksanakan secara aktif dan optimal	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelaksanaan sosialisasi akan arti pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan belum sampai ke tingkat desa.</li><li>• Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan Dokumen Kependudukan</li></ul>
2.	Penyelenggaraan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil belum optimal.	Belum tercapainya tingkat cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Selain itu Ketersediaan SDM yang terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas
3.	Belum meratanya layanan	Belum tersedianya sarana transportasi dan jaringan internet yang memadai untuk akses	Terbatasnya akses biaya transportasi dan penyediaan jaringan internet yang masih belum merata di setiap wilayah pedesaan

	<p>kependudukan ke kepulauan akibat factor geografis dan keberadaan jaringan internet</p> <p>4. Tingkat pemanfaatan data kependudukan Skala Kabupaten masih rendah</p>	<p>layanan disetiap wilayah kecamatan</p> <p>Pemanfaatan data kependudukan oleh Instansi/ Lembaga Lain belum optimal</p>	<p>Rendahnya pemahaman Instansi/Opd terhadap pentingnya data kependudukan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan untuk menunjang pembangunan dan kesejahteraan warga. Selain itu lambatnya respon dari Dirjen Dukcapil terkait PKS sehingga mempengaruhi proses hak akses</p>
--	--	--	--

Selain permasalahan, adapun tantangan dan peluang dalam pengembangan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu :

1. Belum terpenuhinya ketersediaan SDM Aparatur Sipil yang dibutuhkan yang memiliki kemampuan dalam bidang pemerintahan maupun teknologi untuk pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil baik kuantitas maupun kualitas serta belum meratanya kompetensi SDM pada saat ini.
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana kerja sebagai pendukung pelayanan Adminduk.
3. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri dari 11 Kecamatan dimana terdapat 6 Kecamatan Kepulauan yang terpisah dari daratan Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Masih kurangnya aksesibilitas terhadap pelayanan administrasi kependudukan, yang disebabkan jarak yang jauh, khususnya wilayah kepulauan.
6. Masih terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program kegiatan sehingga mempengaruhi terhadap kinerja pelayanan perangkat daerah.
7. Pola komunikasi dan koordinasi antar unit kerja di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih harus terus dibangun

Adapun peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah :

1. Tersedianya UU Nomor 24 tahun 2023 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Tersedianya Perda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
3. Adanya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Apresiasi dan harapan yang tinggi dari Pimpinan Daerah, DPRD dan masyarakat serta dari stakeholder lainnya terhadap keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk terbangunnya

system data kependudukan yang baik.

5. Dukungan dari Tim Anggaran Pemerintah daerah untuk melaksanakan program kependudukan dan pencatatan sipil.
6. Adanya komitmen Pimpinan dan Staf untuk diterapkannya pelayanan prima.
7. Mendekatkan pelayanan Administrasi Kependudukan ke kecamatan (Desa/Kelurahan) melalui jemput bola.
8. Kebutuhan akan ketersediaan database kependudukan yang akurat dan termanfaatkannya data kependudukan yang sangat dibutuhkan oleh OPD, Instansi, Pemerintah daerah ataupun lembaga lainnya.
9. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan mudah diakses.

### **2.2.2 Isu - Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Isu –isu strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang penting yang harus focus untuk diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan program kegiatan, karena dampaknya yang signitif bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya; dan apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan dalam jangka panjang.

Isu – isu strategis Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil diidentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi serta pemasalahan yang dihadapi dan isu lingkungan yang relevan baik di tingkat regional, nasional maupun global yang mengacu pada Renstra K/L, Renstra Provinsi Sulawesi Selatan, KLHS RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 - 2029 dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2.2.1. Perumusan Isu – Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 – 2029**

Potensi Daerah Yang menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Potensi tertib administrasi kependudukan	Belum seluruh masyarakat memiliki dokumen kependudukan yang lengkap, valid dan akurat	Tata Kelola Pemerintahan	Transformasi Digital	Bonus Demografi, Tata Kelola dan akuntalibitas Pemerintahan	Pemanfaatan Bonus Demografi	Peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan yang valid untuk mendukung hak sipil dan pemanfaatan bonus demografi
	Penyelenggaraan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil belum optimal.	Tata Kelola Pemerintahan	Transformasi Digital	Transformasi Teknologi Digital	Transformasi Teknologi Digital	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi layanan administrasi kependudukan melalui Transformasi digital</li> <li>• Peningkatan kualitas pelayanan administrasi</li> </ul>

						kependudukan kepada masyarakat dan berintegritas
	Belum meratanya layanan kependudukan ke kepulauan akibat factor geografis dan keberadaan jaringan Internet	Tata Kelola Pemerintahan	Transformasi Digital	Transformasi Teknologi Digital	Transformasi Teknologi Digital	Perluasan akses dan pemerataan layanan administrasi kependudukan berbasis digital hingga wilayah kepulauan
	Tingkat pemanfaatan data kependudukan Skala Kabupaten masih rendah	Tata Kelola Pemerintahan	Transformasi Digital	Bonus Demografi, Tata Kelola dan akuntalibitas Pemerintahan	Pemanfaatan Bonus Demografi	Pemanfaatan data kependudukan sebagai basis dalam berbagai pelayanan publik, dan perencanaan pembangunan serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dan ditetapkan isu – isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

1. Peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan yang valid untuk mendukung hak sipil dan pemanfaatan bonus demografi
2. Optimalisasi layanan administrasi kependudukan melalui Transformasi digital
3. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dan berintegritas
4. Perluasan akses dan pemerataan layanan administrasi kependudukan berbasis digital hingga wilayah kepulauan
5. Pemanfaatan data kependudukan sebagai basis dalam berbagai pelayanan publik, dan perencanaan pembangunan serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang bersifat spesifik dan operasional. Tujuan ini sebagai indikator untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan dinas kependudukan dan pencatatan sipil jangka menengah kabupaten kepulauan selayar, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil secara keseluruhan. Dalam upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan tujuan perangkat daerah yaitu :

**“ Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien “**

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaras dengan Misi 1 yang tertuang di dalam RPJMD Tahun 2025 – 2030 Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif dengan tujuan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.

#### **3.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

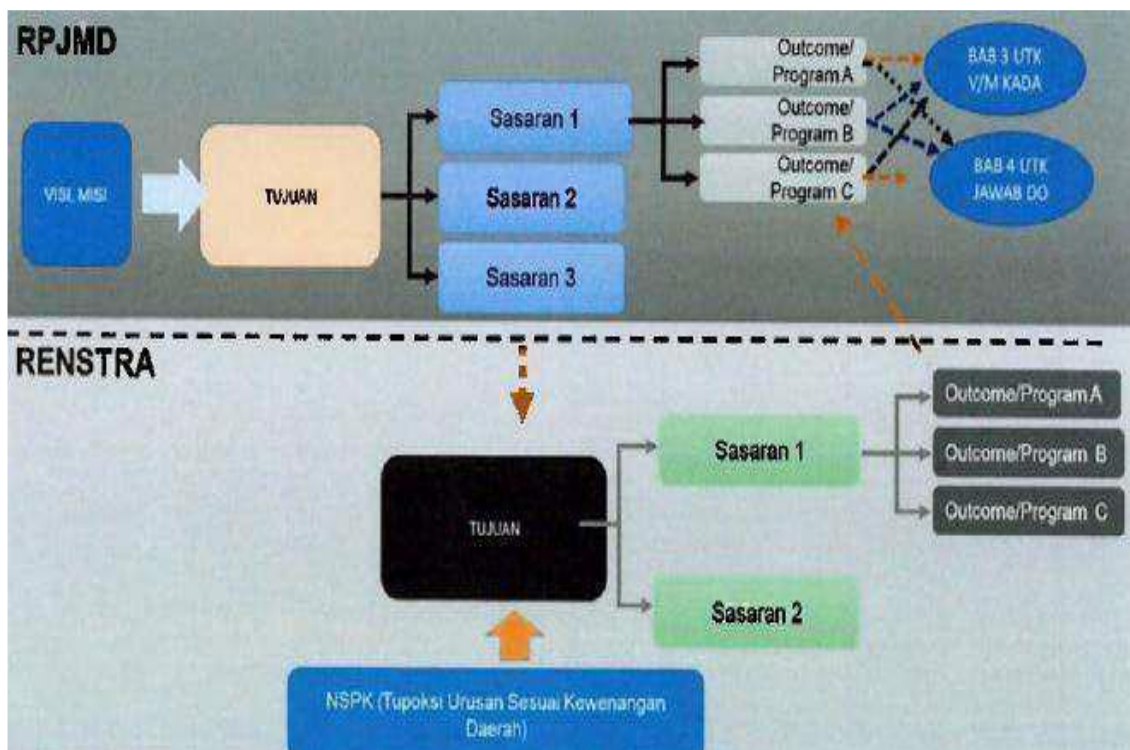
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. Sasaran diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka ditetapkan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan yang valid, akurat dan inklusif

2. Meningkatnya jumlah pemanfaatan data kependudukan skala kabupaten
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik perangkat daerah

Kerangka keterkaitan antara sasaran dan tujuan RPJMD dengan sasaran dan tujuan pada renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini

Gambar 3.2.1. Kerangka Keterkaitan antara sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra



Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 3.2.1**  
**RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2024)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE						KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2030)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Bidang urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
Meningkatnya Birokrasi Pemerintahan transparan dan Kolaboratif	Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	84,63	84,63	85	85,50	86	86,50	87	87

		1.1 Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen Kependudukan yang valid, akurat dan inklusif	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan lengkap	81,71	81,71	82,41	83,28	84,15	85,50	86,37	86,37
		1.2 Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Kabupaten	Persentase capaian pemanfaatan data kependudukan skala kabupaten	85,59	85,59	85,96	86,57	87	87,37	87,74	87,74
		1.3 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	64,85 (B)	64,85 (B)	65 (B)	65,55 (B)	68,35 (B)	70,48 (BB)	72 (BB)	72 (BB)

**Tabel 3.2.2**

**PENYELARASAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH DENGAN  
INDIKATOR KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PADA RPJMD TAHUN 2025 - 2029**

**PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

RPJMD 2025-2029				RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 - 2029		
No	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan	Sasaran	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)
<b>I</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan</b>					
1.	Meningkatnya birokrasi pemerintahan transparan dan kolaboratif	Program Peningkatan Kualitas Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	1.1 Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen Kependudukan yang valid, akurat dan inklusif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pendaftaran Penduduk</li> <li>- Program Pencatatan Sipil Sipil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-El)</li> <li>- Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)</li> <li>- Persentase Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD)</li> <li>- Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Pada Penduduk Usia 0 – 17 Tahun</li> <li>- Persentase Cakupan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang dilaporkan</li> <li>- Persentase cakupan</li> </ul>

				<p>1.2 Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Kabupaten</p> <p>1.3 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</li> <li>- Program Pengelolaan Profil kependudukan</li> <li>- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> </ul>	<p>Kepemilikan Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian pada semua Individu Pasangan yang Perceraianya dilaporkan</li> <li>- Persentase OPD yang telah melaksanakan perjanjian kerjasama pemanfaatan data</li> <li>- Persentase ketersediaan data profil kependudukan</li> <li>- Persentase Capaian Realisasi Anggaran</li> <li>- Persentase Capaian Kinerja</li> <li>- Persentase Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kunci</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--

### **3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Strategi dan Kebijakan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Strategi dan Kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah dan harus selaras dengan strategi dan kebijakan serta rancangan program prioritas dalam RPJMD.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi dasar perumusan kegiatan serta target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD Tahun 2025 – 2030 yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Strategi dan Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025-2029 merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD. Penekanan prioritas kebijakan pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode yang lain dalam rangka mencapai sasaran lima tahunan yang termuat dalam RPJMD. Dengan prioritas kebijakan tersebut tidak berarti program/kegiatan merupakan operasional pembangunan bagi perangkat daerah. Program/kegiatan yang diprioritaskan tidak berjalan maka tetap harus dilaksanakan dengan penekanan strategi yang lebih rendah dibandingkan yang diprioritaskan. Kebijakan pembangunan dengan penekanan strategi yang dimaksud adalah program-program operasional yang dilaksanakan oleh semua perangkat daerah yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan. Arah kebijakan pembangunan yang disusun dalam renstra harus mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar secara efektif dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan keselarasannya dengan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 – 2030.

Teknik merumuskan arah kebijakan perangkat daerah disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel. 3.3.1 Perumusan Arah Kebijakan Perangkat Daerah**

No	Oprasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	<p>- Norma</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</li> <li>• Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Membantu Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan</li> <li>• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan</li> <li>• Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan</li> <li>• Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan</li> </ul> <p>- Standar</p>	<p>Meningkatkan pelayanan public berbasis teknologi informasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, cepat dan terjangkau</li> <li>• Mendorong transformasi digital layanan administrasi kependudukan</li> <li>• Meningkatkan pemerataan akses layanan kependudukan di wilayah kepulauan</li> <li>• Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan untuk perencanaan pembangunan dan untuk akses berbagai pelayanan publik</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan standar kualitas dan format dokumen kependudukan (KTP, KK, KIA, Akta kelahiran, Akta kematian, Akta Perkawinan dan Perceraian, Pengakuan anak, Pengesahan Anak, Pengangkatan anak, Perubahan nama, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pindah Datang, Surat Keterangan, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Pembatalan Akta perkawinan dan perceraian).</li> <li>• Penentuan standar kompetensi yang harus dimiliki oleh pegawai dalam pengelolaan informasi dan pelayanan kependudukan</li> <li>• Pemberian edukasi yang interaktif dan mudah dipahami untuk berbagai kelompok masyarakat dan OPD tentang pentingnya penggunaan dokumen kependudukan untuk kemudahan dalam berbagai pelayanan public</li> <li>• Penggunaan teknologi informasi untuk penyebaran informasi kependudukan agar dapat diakses secara luas.</li> <li>• Menetapkan standar system informasi yang terintegrasi untuk memudahkan masyarakat mengakses pelayanan serat memastikan data dapat diproses dan</li> </ul>			
--	--	--	--

	<p>diakses secara efisien.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan Standar Perlindungan data pribadi penduduk termasuk data sensitive seperti suduk jari, iris mata, tanda tangan dan informasi pribadi lainnya untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data</li> <li>- Prosedur</li> <li>• Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan</li> <li>• Distribusi layanan melalui pelayanan keliling dan beberapa inovasi (Alamakk, Lakuwa, Lacak, Pakaballo Desaku, Selayar Bisa)</li> <li>• Pendaftaran permohonan dengan mengunjungi situs link yang telah disediakan atau mengunjungi langsung kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil</li> <li>• Pengisian data secara lengkap terkait peristiwa kependudukan</li> <li>• Mengunggah dokumen sesuai persyaratan dan dokumen lain yang relevan sesuai jenis permohonan</li> <li>• Verifikasi dan validasi data dan dokumen melalui system informasi kependudukan</li> <li>• Penerbitan dokumen kependudukan</li> <li>• Monitoring dan evaluasi kualitas layanan</li> </ul>			
--	--	--	--	--

	<p>- Kriteria</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waktu pelayanan yang cepat dan terukur</li> <li>• Kemudahan masyarakat dalam mengakses pelayanan public</li> <li>• Layanan kependudukan menjangkau seluruh kecamatan/desa</li> <li>• Luasnya jangkauan informasi kependudukan yang tersampaikan kepada masyarakat.</li> <li>• Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan</li> <li>• Peningkatan partisipasi aktif OPD dalam program pemanfaatan data kependudukan</li> <li>• Meningkatnya pemahaman dan kemampuan pegawai dalam penggunaan system informasi kependudukan dan penyampaian informasi yang akurat kepada masyarakat penerima layanan.</li> <li>• Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan</li> </ul>			
--	---	--	--	--

**Tabel 3.3.2**

**Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 -2029**

Visi : Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera				
Misi 1 : Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif				
Arah Kebijakan RPJMD	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<p>1. Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen Kependudukan yang valid, akurat dan inklusif</p> <p>2. Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan data</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, cepat dan terjangkau</li> <li>• Mendorong transformasi digital layanan administrasi kependudukan</li> <li>• Meningkatkan pemerataan akses layanan kependudukan di wilayah kepulauan</li> <li>• Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan untuk perencanaan pembangunan dan untuk akses</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas dan kapabilitas penyelenggara administrasi kependudukan melalui pelatihan/bimtek</li> <li>• Pengembangan layanan administrasi kependudukan berbasis digital dan mobile</li> <li>• Pemenuhan Sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan</li> <li>• Pelayanan keliling ke wilayah kecamatan kepulauan maupun kecamatan daratan</li> <li>• Pemanfaatan layanan administrasi kependudukan yang berbasis internet</li> </ul>

		Kependudukan Berskala Kabupaten	berbagai pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)</li> <li>• Integrasi data kependudukan dengan berbagai layanan public</li> <li>• Penyediaan dan pemutakhiran serta validasi data kependudukan yang berbasis NIK.</li> <li>• Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat ataupun OPD/Lembaga tentang pentingnya adminduk dan pemanfaatan data kependudukan</li> <li>• Pelaksanaan Penyusunan profil kependudukan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten</li> </ul>
--	--	---------------------------------------	---------------------------	--

		<p>3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur yang ditunjang perangkat teknologi informasi yang baik</li> <li>• Meningkatnya kualitas perencanaan yang berorientasi hasil</li> <li>• Meningkatnya pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan disiplin, kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia</li> <li>• Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</li> </ul>
--	--	--	--	--

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka diperlukan penahapan pelaksanaan renstra setiap tahunnya. Penahapan pelaksanaan dalam renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat penting untuk menunjukkan dimana program, kegiatan atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Penyajian lokus atau penahapan Renstra Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun disajikan pada tabel di bawah ini ;

**Tabel 3.3.3 Penahapan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

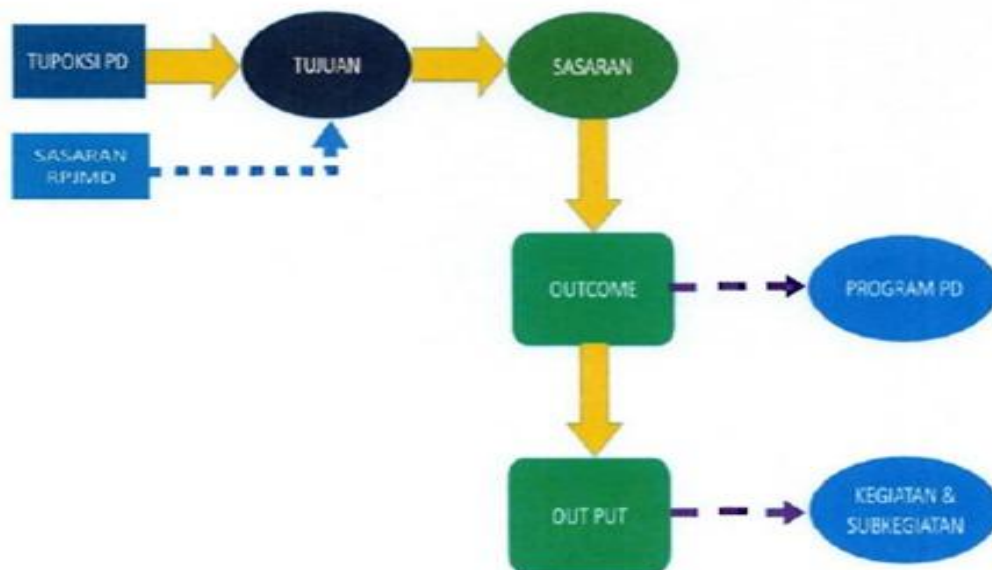
Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
1	2	3	4	5
Peningkatan keakurasian data melalui profil kependudukan dan penyajian data kependudukan skala kabupaten	Penguatan peran data kependudukan melalui peningkatan aksesibilitas dan penggunaan data untuk berbagai pelayanan publik	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan melalui percepatan transformasi digital	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta kapabilitas penyelenggara pelayanan untuk mendukung pelayanan yang berkualitas	Terintegrasinya data kependudukan nasional

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**4.1 Uraian Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator, Target dan Pagu Indikatif**

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output. Berikut adalah kerangka perumusan program kegiatan dan sub kegiatan :

Gambar 4.1.1. Kerangka perumusan program/kegiatan/subkegiatan



**Tabel. 4.1.1. Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

<b>SASARAN RPJMD</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
Meningkatnya birokrasi pemerintahan transparan dan kolaboratif	Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan		
		Meningkatkan capaian kepemilikan dokumen kependudukan yang valid, akurat dan inklusif			Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan lengkap		
			<b>Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital</b></li> <li>- <b>Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)</b></li> <li>- <b>Cakupan kepemilikan KTP-EI</b></li> </ul>	<b>Program Pendaftaran Penduduk</b>	
				<b>Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase Peningkatan layanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	
				Tersedianya Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	

				Tersedianya Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	
				Terfasilitasinya penduduk dalam penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	
				Tersedianya Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	
				Tersedianya Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	
				Tersedianya Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan	
				Tersedianya Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	
				Tersedianya Dokumen Pengumpulan Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk	Jumlah Dokumen Pengumpulan Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk	Pengumpulan, analisis dan diseminasi data terkait pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	
				<b>Terlaksananya Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase Peningkatan Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	
				Tersedianya Dokumen Tata Cara Perencanaan,	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan,	Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi,	

				Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pendaftaran penduduk	
				Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Pengadaan dokumen kependudukan selain blanko KTP-EI, Formulir dan Buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	
				<b>Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	
				Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten dalam penitiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten dalam penitiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Koordinasi antar Lembaga pemerintah dan Lembaga non- pemerintah di kabupaten/kota dalam penerbitan pelayanan pendaftaran penduduk	
				Tersedianya Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	

				Pendaftaran Penduduk			
				Tersedianya Laporan Hasil Fasilitas pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas pendaftaran penduduk	Fasilitas Pendaftaran Penduduk	
				Tersedianya Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang dimanfaatkan	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang dimanfaatkan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan terkait pendaftaran penduduk	
				Tersedianya Laporan hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Sosialisasi pendaftaran penduduk	
				Tersedianya Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi terkait pendaftaran penduduk	
				Terfasilitasinya para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam mendapatkan komunikasi informasi dan edukasi terkait pendaftaran penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Komunikasi, Informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan masyarakat terkait pendaftaran penduduk	
				Tersedianya Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait Pendaftaran Penduduk	Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait pendaftaran penduduk	
				<b>Terlaksananya Pembinaan dan</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan</b>	

				<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>peningkatan capaian pendaftaran penduduk</b>	<b>Pendaftaran Penduduk</b>	
				Tersedianya Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pengelolaan dan pelaporan penggunaan blanko dokumen kependudukan, formulir dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk.	
				Tersedianya Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	Pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	
				Tersedianya Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	
			<b>Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 -1 7 tahun</b></li> <li>- <b>Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan</b></li> <li>- <b>Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan</b></li> <li>- <b>Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang</b></li> </ul>	<b>Program Pencatatan Sipil</b>	

					<b>perceraianya dilaporkan</b>		
				<b>Terlaksananya pelayanan pencatatan sipil</b>	<b>Persentase peningkatan layanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	
				Tersedianya Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	
				Meningkatnya Layanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	
				Tersedianya Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Pengumpulan, analisis dan diseminasi data pencatatan sipil	
				Tersedianya Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	Penyusunan tatacara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pencatatan sipil	
				Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP-El, formulir dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan	

				<b>Terlaksananya penyelenggaraan pencatatan sipil</b>	<b>Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	
				Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama Kab/Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk	
				Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama Kab/Kota dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kab/Kota	
				Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-	Koordinasi antar Lembaga pemerintah dan Lembaga non- pemerintah di	

				Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten dalam Penertiban Peayanan Pencatatan Sipil	Pemerintah di Kabupaten dalam Penertiban Peayanan Pencatatan Sipil	Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayan Pencatatan Sipil	
				Tersedianya Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	
				Tersedianya Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	Penerimaan dan permintaan data kependudukan dari perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri terkait pencatatan sipil	
				Tersedianya Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Fasilitasi terkait pencatatan sipil	
				Tersedianya Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pemanfaatan data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	
				Tersedianya Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	Sosialisasi terkait pencatatan sipil	
				Tersedianya Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi terkait pencatatan sipil	

				Terkait Pencatatan Sipil			
				Tersedianya Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil	Komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencatatan sipil	
				Tersedianya Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait pencatatan sipil.	
				<b>Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap peningkatan capaian pencatatan Sipil</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	
				Tersedianya Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	
				Tersedianya Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	Pembinaan dan Pengawasan terkait pencatatan sipil	
				Tersedianya Laporan Supervisi Bersama	Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementrian yang	

				dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi penduduk yang beragama islam dalam rangka pembangunan basis data kependudukan terkait Pencatatan Sipil	
				Tersedianya Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Bimbingan teknis terkait pencatatan sipil.	
		Meningkatnya jumlah pemanfaatan data kependudukan skala kabupaten			Persentase capaian pemanfaatan data kependudukan skala kabupaten		
			<b>Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan</b>		<b>Persentase OPD yang telah melaksanakan perjanjian Kerjasama pemanfaatan data kependudukan</b>	<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	
				<b>Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan, Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>Persentase ketersediaan data kependudukan</b>	<b>Pengumpulan Data Kependudukan, Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	
				Tersedianya Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan disajikan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan disajikan	Pengolahan dan penyajian data kependudukan	

				Tersedianya Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	
				Tersedianya Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah	
				<b>Terlaksananya Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentase Peningkatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	
				Tersusunnya Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	
				<b>Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentase Informasi Administrasi Kependudukan yang diselenggarakan</b>	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	
				Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam	Koordinasi antar Lembaga pemerintah dan Lembaga non pemerintah dikabupaten/kota dalam penertiban pengelolaan	

				Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Informasi Administrasi Kependudukan	
				Tersedianya Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	Penerimaan dan permintaan data kependudukan dari perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri	
				Tersedianya Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitas terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	
				Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	
				Tersedianya Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	
				Tersedianya Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	Kerjasama dengan organisasi masyarakat dan perguruan tinggi	
				Tersedianya Dokumen Hasil Komunikasi,	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku	Komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan	

				Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Kepentingan dan Masyarakat	masyarakat.	
				Tersedianya Dokumen data Kependudukan yang akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen data Kependudukan yang akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Penyediaan data kependudukan yang akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	
				<b>Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentase Informasi Administrasi Kependudukan yang diawasi dan dibina</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	
				Tersedianya Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	
				Tersedianya Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama Kab/Kota dan Pengadilan Agama mengenai pelaporan pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan basis data kependudukan	

				dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan			
				Tersedianya Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data	
			<b>Meningkatnya kualitas profil Kependudukan</b>		<b>Persentase Data Profil Kependudukan yang disusun tepat waktu</b>	<b>Program Pengelolaan Profil Kependudukan</b>	
				<b>Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>Jumlah Data Profil Kependudukan yang tersusun</b>	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	
				Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Penyediaan data kependudukan Kab/Kota	
				Tersusun dan tersedianya Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			<b>Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban kinerja dan keuangan OPD secara transparan</b>		<b>Persentase capaian realisasi anggaran OPD</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
					<b>Persentase capaian kinerja OPD</b>		
					<b>Persentase capaian</b>		

				<b>indicator kinerja kunci OPD</b>		
				<b>Meningkatnya pelayanan dan pengelolaan kinerja perangkat daerah</b>	<b>Persentase cakupan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
				Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
				Tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
				Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
				Tersedianya dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD
				Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

				laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar	laporan capaian kinerja dan ikhtisar	SKPD	
				Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Tersedianya Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan data Statistik Sektoral Daerah	
				Tersedianya Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan selain Renstra PD dan Renja PD	
				Tersedianya substansi koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan	Jumlah substansi koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	

				Pemerintahan Daerah yang Diampu			
				Tersedianya Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan.	
				<b>Meningkatnya pelayanan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah</b>	<b>Persentase cakupan dokumen/laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
				Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Tersedianya dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	
				Tersedianya dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	
				Tersedianya Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

				tahun			
				Tersedianya dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	
				Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	
				Tersedianya Dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi Anggaran	
				<b>Meningkatnya pelayanan dan pengelolaan administrasi barang milik daerah</b>	<b>Persentase dokumen/laporan pengelolaan barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	
				Tersedianya rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Penyusunan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Tersedianya dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	Pengamanan barang milik daerah SKPD	
				Tersedianya laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	
				Tersedianya laporan hasil pembinaan pengawasan dan	Jumlah laporan hasil pembinaan pengawasan dan pengendalian barang milik	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	

				pengendalian barang milik			
				Tersedianya laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tersedianya laporan peratausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan peratausahaan barang milik daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tersedianya dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada SKPD	Pemanfaatan barang milik daerah SKPD	
				<b>Meningkatnya pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
				Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	
				Tersedianya Dokumen pendataan dan Pengolahan kepegawaian	Jumlah Dokumen pendataan dan Pengolahan kepegawaian	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	
				Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	
				Tersedianya Dokumen Monitoring,	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	

				Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pegawai		
				Terlaksananya pemulangan pegawai ayng pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	
				Terlaksananya pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas	Jumlah laporan hasil pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas	Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas	
				Terlaksananya pemindahan tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindah tugaskan	Pemindahan Tugas ASN	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	
				Terlaksananya BimbinganTeknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	
				<b>Meningkatnya pelayanan dan pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
				Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	
				Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	
				Tersedianya peralatan rumah	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Penyediaan peralatan rumah tangga	

				tangga			
				Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Penyediaan bahan logistic kantor	
				Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
				Tersedianya dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	
				Tersedianya bahan/material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Penyediaan Bahan/material	
				Terlaksananya fasilitas kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	
				<b>Meningkatnya ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan BMN</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Pengadaan kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	Pengadaan kendaraan	

				Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	operasional atau lapangan yang disediakan	Dinas operasional atau lapangan	
				Tersedianya alat besar	Jumlah unit alat besar yang disediakan	Pengadaan Alat Besar	
				Tersedianya alat angkutan darat tak bermotor	Jumlah unit alat angkutan darat tak bermotor yang	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak\bermotor	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	
				Tersedianya aset tetap lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
				Tersedianya aset tak berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Pengadaan Aset Tak Berwujud	
				Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Pengadaan Gedung kantor dan bangunan lainnya	
				Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	
				Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	
				<b>Meningkatnya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
				Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	
				Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dsn listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dsn listrik yang disediakan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
				Tersedianya jasa	Jumlah laporan penyediaan	Penyediaan jasa peralatan	

				peralatan dan perlengkapan kantor	jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	dan perlengkapan kantor	
				Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	
				<b>Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Persentase BMD dalam kondisi baik</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan di bayarkan pajak perizinannya	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	
				Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	
				Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan angkutan darat tak bermotor	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dan dibayarkan perizinannya	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat angkutan darat tak bermotor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	
				Terlaksananya	Jumlah aset tetap lainnya	Pemeliharaan aset tetap	

				Pemeliharaan aset tetap lainnya	yang dipelihara	lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan aset tak berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Pemeliharaan aset tak berwujud	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/rehabilitasi tanah	Luas tanah yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	Pemeliharaan/rehabilitasi tanah	

**TABEL 4.1.2**  
**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Pendanaan**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2025 - 2029**  
**Berdasarkan Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025 Kabupaten Kepulauan Selayar**

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	BASELINE 2024	TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KET
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
<b>BIDANG URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>					3,538,718,500		4,000,101,000		3,107,350,500		3,075,315,400		2,935,410,000		3,223,901,700	
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase capaian realisasi anggaran (%)</b>	94.87%	94.87%		95.00%	95.50%		96.35		97.00%		98.00%			
		<b>Persentase capaian kinerja OPD</b>	67.67%	69.00%	3,370,277,100	70.00%	3,697,101,000	71.31%	2,891,153,900	72.51%	2,828,282,400	73.35%	2,672,004,700	75.00%	2,922,969,600	
		<b>Persentase realisasi capaian indikator kinerja kunci OPD</b>	88%	88%		89.00%	89.30%		90.45%		91.00%		92.5%			
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja yang diselesaikan tepat waktu</b>	100%	100%	55,565,200	100%	109,589,200	100%	74,000,000	100%	71,000,000	100%	70,600,000	100%	91,843,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	3 Dok.	3 Dok.	17,976,000	3 Dok.	60,000,000	3 Dok.	23,000,000	3 Dok.	20,000,000	3 Dok.	21,600,000	3 Dok.	20,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1Dok.	1Dok.	5,000,000	1Dok.	5,000,000	1Dok.	5,000,000	1Dok.	5,000,000	1Dok.	5,000,000	1Dok.	5,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	1Dok.	1Dok.	5,000,000	1Dok.	5,000,000	1Dok.	5,000,000	1Dok.	5,000,000	1Dok.	5,000,000	1Dok.	5,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1Dok.	1Dok.	5,000,000	1Dok.	5,000,000	1Dok.	5,000,000	1Dok.	5,000,000	1Dok.	5,000,000	1Dok.	5,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Tersedianya dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen perubahan DPA-SKPD	1Dok.	1Dok.	5,000,000	1Dok.	5,000,000	1Dok.	5,000,000	1Dok.	5,000,000	1Dok.	5,000,000	1Dok.	5,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar	3 Lap	3 Lap	5,000,000	3 Lap	5,000,000	3 Lap	6,000,000	3 Lap	6,000,000	3 Lap	6,000,000	3 Lap	6,000,000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	3 Lap	3 Lap	12,589,200	3 Lap	17,589,200	3 lap.	25,000,000	3 lap.	25,000,000	3 lap.	23,000,000	3 lap.	25,000,000	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Tersedianya Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup Perangkat Daerah	Data	Data	0.00	Data	0.00	Data	0.00	Data	0.00	Data	0.00	Data	0.00	
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	Berita Acara	0.00	Berita Acara	0.00	Berita Acara	0.00	Berita Acara	0.00	Berita Acara	0.00	Berita Acara	10,000,000	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dok.	Dok.	0.00	Dok.	0.00	Dok.	0.00	Dok.	0.00	Dok.	0.00	Dok.	5,843,000	

Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Tersedianya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Dok.	Dok.	0.00	Dok.	7,000,000	Dok.	0.00	Dok.	0.00	Dok.	0.00	Dok.	5,000,000
Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Tersedianya substansi koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah substansi koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Substansi	Substansi	0.00	Dok.	0.00	Dok.	0.00	Dok.	0.00	Dok.	0.00	Dok.	0.00
Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Tersedianya Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Berita Acara	Berita Acara	0.00	1BA	0.00	1BA	0.00	1BA	0.00	1BA	0.00	1BA	0.00
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen/Laporan Pengelolaan Keuangan yang diselesaikan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2,473,945,600</b>	<b>100%</b>	<b>2,291,890,000</b>	<b>100%</b>	<b>2,264,917,052</b>	<b>100%</b>	<b>2,165,196,097</b>	<b>100%</b>	<b>2,032,318,397</b>	<b>100%</b>	<b>2,077,040,297</b>
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12 lap	12 lap	2,439,022,000	26 orang/Bln	2,216,890,000	26 Orang/Bln	2,217,917,052	30 Orang/bl	2,123,196,097	33 Orang/bl	1,995,318,397	33 Orang/Bln	2,031,440,297
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	-	-	0.00		0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Tersedianya dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 lap	12 lap	5,000,000	12 Dok	5,000,000	12 Dok	0.00	12 Dok	0.00	12 Dok	0.00	12 Dok	8,600,000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	-	-	0.00	1Lap	0.00	1Lap	0.00	1Lap	0.00	1Lap	0.00	1Lap	0.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1Lap	1Lap	8,211,600	1Lap	20,000,000	1Lap	7,000,000	1Lap	7,000,000	1Lap	7,000,000	1Lap	7,000,000
Pengelolaan dan persiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Tersedianya dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	2 lap	2 lap	5,000,000	1Dok	5,000,000	1Dok	5,000,000	1Dok	5,000,000	1Dok	5,000,000	1Dok	5,000,000
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triulan/semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan bulanan/triulan/semesteran SKPD dan laporan keuangan bulanan/triulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triulan/semesteran SKPD dan laporan keuangan bulanan/triulan/semesteran SKPD	12 lap	12 lap	11,712,000	12 Lap	40,000,000	12 Lap	30,000,000	12 Lap	25,000,000	12 Lap	20,000,000	12 Lap	20,000,000
Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi keuangan	Tersedianya Dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	12 lap	12 lap	5,000,000	12 Dok	5,000,000	12 Dok	5,000,000	12 Dok	5,000,000	12 Dok	5,000,000	12 Dok	5,000,000
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen/Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>4,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>4,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>4,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>4,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>4,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>4,000,000</b>
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	-	-	0.00	2 dok	0.00	2 dok	0.00	2 dok	0.00	2 dok	0.00	2 dok	0.00
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	-	-	0.00	1Dok	0.00	-	0.00	-	0.00	1Dok	0.00	1Dok	0.00

Koordinasi dan Penilaian barang milik daerah SKPD	Tersedianya laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	-	-	0.00	1lap	0.00	-	0.00	-	0.00	1lap	0.00	1lap	0.00
Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	Tersedianya laporan hasil pembinaan pengawasan dan pengendalian barang milik	Jumlah laporan hasil pembinaan pengawasan dan pengendalian barang milik	-	-	0.00	1lap	0.00	-	0.00	-	0.00	1lap	0.00	1lap	0.00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	4 lap	4 lap	4,000,000	4 lap	4,000,000	4 lap	4,000,000	4 lap	4,000,000	4 lap	4,000,000	4 lap	4,000,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya laporan peratausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan peratausahaan barang milik daerah pada SKPD	-	-	0.00	1lap	0.00	1lap	0.00	1lap	0.00	1lap	0.00	1lap	0.00
Pemanfaatan barang milik daerah pada SKPD	Tersedianya dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada SKPD	-	-	0.00	1Dok	0.00	-	0.00	-	0.00	1Dok	0.00	1Dok	0.00
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>5,560,000</b>	<b>100%</b>	<b>5,560,000</b>	<b>100%</b>	<b>5,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>5,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>5,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>56,000,000</b>
Peningkatan sarana dan prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	0.00		0.00	-	0.00	1unit	0.00	-	0.00	-	0.00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	0.00	64 Paket	0.00	64 Paket	0.00	64 Paket	0.00	64 Paket	0.00	64 Paket	0.00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Dokumen pendataan dan Pengolahan kepegawaian	Jumlah Dokumen pendataan dan Pengolahan kepegawaian	12 lap	12 lap	5,560,000	12Dok	5,560,000	12Dok	5,000,000	12Dok	5,000,000	12Dok	5,000,000	12Dok	5,000,000
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	0.00	1dok	0.00	1dok	0.00	1dok	0.00	1dok	0.00	1dok	0.00
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	0.00	1dok	0.00	1dok	0.00	1dok	0.00	1dok	0.00	1dok	0.00
Pemulangan Pegawai yang pensiun	Terlaksananya pemulangan pegawai pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1Orang	0.00	2Orang	0.00	2Orang	0.00
Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas	Terlaksananya pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas	Jumlah laporan hasil pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
Pemindahan tugas ASN	Terlaksananya pemindahan tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindah tugaskan	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	-	0.00	3Orang	0.00	3 orang	0.00	4 orang	0.00	3 orang	0.00	3 orang	30,000,000
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	-	0.00	40 orang	0.00	40 orang	0.00	40 orang	0.00	40Orang	0.00	50Orang	0.00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-	-	0.00	3Orang	0.00	3Orang	0.00	4Orang	0.00	5 orang	0.00	3 orang	21,000,000

<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi umum kantor</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>240,061,500</b>	<b>100%</b>	<b>366,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>116,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>156,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>136,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>187,000,000</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 Paket	1Paket	4,000,000	1Paket	4,000,000	1Paket	4,000,000	1Paket	4,000,000	1Paket	4,000,000	1Paket	4,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Paket	6 Paket	119,450,000	1Paket	250,000,000	1Paket	0.00	1Paket	40,000,000	1Paket	0.00	1Paket	50,000,000
Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	-	-	4,000,000	1Paket	0.00	1Paket	0.00	1Paket	0.00	1Paket	0.00	1Paket	0.00
Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	-	-	0.00	1Paket	0.00	1Paket	0.00	1Paket	0.00	1Paket	0.00	1Paket	0.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 Paket	12 Paket	7,000,000	12Paket	7,000,000	12Paket	7,000,000	12Paket	7,000,000	12Paket	7,000,000	12Paket	8,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	6 Dok	6 Dok	5,000,000	6 Dok	5,000,000	6 Dok	5,000,000	6 Dok	5,000,000	6 Dok	5,000,000	6 Dok	5,000,000
Penyediaan Bahan/material	Tersedianya bahan/material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	-	-	0.00	1Paket	0.00	1Paket	0.00	1Paket	0.00	1Paket	0.00	1Paket	0.00
Fasilitas kunjungan tamu	Terlaksananya fasilitas kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	-	-	0.00	1Lap	0.00	1Lap	0.00	1Lap	0.00	1Lap	0.00	1Lap	0.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Lap	12 Lap	100,611,500	175 Lap	100,000,000	150 lap	100,000,000	175 lap	100,000,000	175 lap	120,000,000	175 lap	120,000,000
Penatausahaan Arsip Dinamis	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	0.00	1dok	0.00	1dok	0.00	1dok	0.00	1dok	0.00	1dok	0.00
Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Terlaksananya dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	-	-	0.00	1dok	0.00	1dok	0.00	1dok	0.00	1dok	0.00	1dok	0.00
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan BMD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>164,192,000</b>	<b>100%</b>	<b>356,101,000</b>	<b>100%</b>	<b>35,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>35,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>40,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>123,000,000</b>
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	-	-	0.00	1unit	0.00	1unit	0.00	1unit	0.00	1unit	0.00	1unit	0.00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang disediakan	-	-	0.00	1Unit	0.00	2Unit	0.00	2Unit	0.00	2Unit	0.00	1Unit	28,000,000
Pengadaan Alat besar	Tersedianya alat besar	Jumlah unit alat besar yang disediakan	-	-	0.00	1Unit	0.00	1Unit	0.00	1Unit	0.00	1unit	0.00	1unit	0.00
Pengadaan Alat angkutan darat tak bermotor	Tersedianya alat angkutan darat tak bermotor	Jumlah unit alat angkutan darat tak bermotor yang	-	-	0.00	1Unit	0.00	1Unit	0.00	1Unit	0.00	1unit	0.00	1unit	0.00
Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	-	-	5,272,000	3Unit	6,101,000	10 unit	0.00	4 unit	0.00	4 unit	0.00	4 unit	15,000,000

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	11Unit	11Unit	158,920,000	9Unit	350,000,000	6 unit	35,000,000	6 unit	35,000,000	7 unit	40,000,000	7 unit	80,000,000
Pengadaan aset tetap lainnya	Tersedianya aset tetap lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	-	-	0.00	1Unit	0.00	1Unit	0.00	1Unit	0.00	1Unit	0.00	1Unit	0.00
Pengadaan aset tak berwujud	Tersedianya aset tak berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	-	-	0.00	1Unit	0.00	1Unit	0.00	1Unit	0.00	1Unit	0.00	1Unit	0.00
Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	-	0.00	1Unit	0.00	1Unit	0.00	1Unit	0.00	1Unit	0.00	1Unit	0.00
Pengadaan Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	-	0.00	1Unit	0.00	1Unit	0.00	15 Unit	0.00	10 Unit	0.00	9Unit	0.00
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	-	0.00	4Unit	0.00	4Unit	0.00	6 unit	0.00	8 unit	0.00	8 unit	0.00
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>287,632,800</b>	<b>100%</b>	<b>420,420,800</b>	<b>100%</b>	<b>277,236,848</b>	<b>100%</b>	<b>277,086,303</b>	<b>100%</b>	<b>277,086,303</b>	<b>100%</b>	<b>277,086,303</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Lap	12 Lap	7,420,800	12 Lap	7,420,800	12 lap	7,000,000	12 lap	7,000,000	12 lap	7,000,000	12 lap	7,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Lap	12 Lap	90,960,000	36 Lap	93,000,000	36 lap	80,984,848	36 lap	80,834,303	36 lap	80,834,303	36 lap	80,834,303
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	-	0.00	1lap	0.00	1lap	0.00	1lap	0.00	1lap	0.00	1lap	0.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Lap	12 Lap	189,252,000	12 Lap	320,000,000	12 lap	189,252,000	12 lap	189,252,000	12 lap	189,252,000	12 lap	189,252,000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>139,320,000</b>	<b>100%</b>	<b>143,540,000</b>	<b>100%</b>	<b>115,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>115,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>107,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>107,000,000</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5Unit	5Unit	19,640,000	4 unit	19,640,000	3 unit	15,000,000	3 unit	15,000,000	3 unit	15,000,000	3 unit	15,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan di bayarkan pajak perizinannya	2 unit	2 unit	78,900,000	2 unit	78,900,000	2 unit	70,000,000	2 unit	70,000,000	2 unit	60,000,000	2 unit	60,000,000
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	-	-	0.00	1Unit	0.00	1Unit	0.00	1Unit	0.00	1Unit	0.00	1Unit	0.00
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan angkutan darat tak bermotor	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan angkutan darat tak bermotor	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dan dibayarkan perizinannya	-	-	0.00	1Unit	0.00	1Unit	0.00	1Unit	0.00	1Unit	0.00	1Unit	0.00
Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	-	-	0.00	1Unit	0.00	1Unit	0.00	17 unit	0.00	1Unit	0.00	1Unit	0.00
Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15 Unit	15 Unit	3,780,000	15 Unit	14,000,000	17 unit	10,000,000	18 unit	10,000,000	18 unit	10,000,000	18 unit	10,000,000

Pemeliharaan aset tetap lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan aset tetap lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	-	-	0,00		0,00	-	0,00	-	0,00	1Unit	0,00	1Unit	0,00	
Pemeliharaan aset tak berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan aset tak berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	-	-	4,000,000	1Paket	4,000,000	1Paket	0,00	1Paket	0,00	1Paket	5,000,000	1Paket	5,000,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1Unit	1Unit	33,000,000	1Unit	27,000,000	1unit	20,000,000	1unit	20,000,000	1unit	17,000,000	1unit	17,000,000	
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	-	0,00		0,00	-	0,00	1unit	0,00	-	0,00	1unit	0,00	
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	-	0,00		0,00	0	0,00	-	0,00	5 unit	0,00	5 unit	0,00	
Pemeliharaan/rehabilitasi tanah	Terlaksananya Pemeliharaan/rehabilitasi tanah	Luas tanah ayng dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	-	-	0,00		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Peresentase Peningkatan Pelayanan BLUD</b>		-	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	-	Unit Kerja	0	Unit Kerja	0	Unit Kerja	0	Unit Kerja	0	Unit Kerja	0	Unit Kerja	0	
<b>Program Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Meningkatnya kualitas layanan Pendaftaran Penduduk</b>	- <b>Persentase Cakupan Kepemilikan KTP-EI</b> - <b>Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)</b> - <b>Persentase Penerapan Identitas Kependudukan Digital</b>	<b>94,31%</b>	<b>94,50%</b>	<b>88,329,100.00</b>	<b>94,50%</b> <b>52,70%</b> <b>15%</b>	<b>160,000,000</b>	<b>95%</b> <b>53%</b> <b>17%</b>	<b>112,817,300</b>	<b>96,43%</b> <b>53,70%</b> <b>20%</b>	<b>125,512,000</b>	<b>97,18%</b> <b>54,50%</b> <b>25%</b>	<b>131,904,300</b>	<b>98,77%</b> <b>55%</b> <b>30%</b>	<b>147,425,200</b>	
<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk</b>	<b>Persentase peningkatan layanan pendaftaran penduduk</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>22,415,000</b>	<b>100%</b>	<b>30,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>30,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>30,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>35,904,300</b>	<b>100%</b>	<b>35,000,000</b>	
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi kependudukan	Tersedianya Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	-	-	0,00	1Dok	0,00	1Dok	0,00	1Dok	0,00	1Dok	0,00	1Dok	0,00	
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Tersedianya Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	-	-	0,00	3Dok	30,000,000	3Dok	30,000,000	3Dok	30,000,000	3Dok	35,904,300	3Dok	35,000,000	
Penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	Terfasilitasinya penduduk dalam penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran penduduk	Tersedianya Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	0,00	2Lap	0,00	2Lap	0,00	2Lap	0,00	2Lap	0,00	2Lap	0,00	
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan peristiwa kependudukan	Tersedianya Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	-	-	22,415,000	3Dok	0,00	3Dok	0,00	3Dok	0,00	3Dok	0,00	3Dok	0,00	
Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa kependudukan	Tersedianya Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	-	-	0,00	1Lap	0,00	1Lap	0,00	1Lap	0,00	1Lap	0,00	1Lap	0,00	
Penerbitan Dokumen Atas Hasil pelaporan peristiwa kependudukan	Tersedianya Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	-	-	0,00	1dok	0,00	1Dok	0,00	1dok	0,00	1dok	0,00	1dok	0,00	

Pengumpulan, Analisis dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Tersedianya Dokumen Pengumpulan Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk	Jumlah Dokumen Pengumpulan Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk	-	-	0.00	1dok	0.00	1Dok	0.00	1dok	0.00	1dok	0.00	1dok	0.00
<b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Terlaksananya Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase Peningkatan Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>100%</b>	<b>62,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>100%</b>	<b>96,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Tersedianya Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	3Dok	3Dok	0.00	3Dok	0.00	3Dok	0.00	3Dok	0.00	3Dok	0.00	3Dok	0.00
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	-	-	0.00	1Dok	0.00	1Dok	62,000,000	1Dok	0.00	1Dok	96,000,000	1Dok	0.00
<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase peningkatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>65,914,100</b>	<b>100%</b>	<b>130,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>20,817,300</b>	<b>100%</b>	<b>95,512,000</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>100%</b>	<b>112,425,200</b>
Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penetiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten dalam penetiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten dalam penetiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	3lap	0.00	3lap	0.00	3Lap	0.00	3Lap	0.00	3Lap	0.00	3lap	0.00
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Tersedianya Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	3Dok	3Dok	54,552,100	3Dok	100,000,000	3Dok	0.00	3Dok	75,000,000	3Dok	0.00	3Dok	92,000,000
Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Tersedianya Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	-	1Lap	11,362,000	1Lap	30,000,000	1Lap	20,817,300	1Lap	20,512,000	1Lap	0.00	1Lap	20,425,200
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Tersedianya Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang dimanfaatkan	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang dimanfaatkan	-	-	0.00	1Dok	0.00	-	0.00	1Dok	0.00	1Dok	0.00	1Dok	0.00
Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Tersedianya Laporan hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	-	-	0.00	1lap	0.00	1Lap	0.00	1Lap	0.00	1lap	0.00	1lap	0.00
Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Tersedianya Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	-	-	0.00	1Dok	0.00	1Dok	0.00	1Dok	0.00	1Dok	0.00	1Dok	0.00
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Terfasilitasinya para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam mendapatkan komunikasi informasi dan edukasi terkait pendaftaran penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	-	-	0.00	2000 Orang	0.00	1000 Orang	0.00	1500 Orang	0.00	2000 Orang	0.00	2000 Orang	0.00
Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait Pendaftaran Penduduk	Tersedianya Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait Pendaftaran Penduduk	-	-	0.00	4Dok	0.00	4Dok	0.00	4Dok	0.00	4Dok	0.00	4Dok	0.00
<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap peningkatan capaian pendaftaran penduduk</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>

Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Tersedianya Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	12 Dok	0.00	12 Dok	0.00	12 Dok	0.00	12 Dok	0.00	12 Dok	0.00	12 Dok	0.00	
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Tersedianya Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	-	1Lap	0.00	1Lap	0.00	1Lap	0.00	1Lap	0.00	1Lap	0.00	1Lap	0.00	
Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Tersedianya Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	-	1Lap	0.00	1Lap	0.00	1Lap	0.00	1Lap	0.00	1Lap	0.00	1Lap	0.00	
<b>Program Pencatatan Sipil</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil</b>	- <b>Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada penduduk usia 0 - 17 Tahun</b> - <b>Persentase Cakupan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan</b> - <b>Persentase Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/ Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan</b> - <b>Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu pasangan yang perceraianya dilaporkan</b>	93,25 % 99,66 % 100 % 100 %	93,25 % 99,66 % 100 % 100 %	33,042,200.00	93,25 % 99,66 % 100 % 100 %	60,000,000 39,70 % 100 % 100 %	93,50 % 99,70 % 100 % 100 %	36,404,400 94% 100 % 100 %	43,774,100 94,50% 100 % 100 %	51,875,200 95% 100 % 100 %	62,666,800				
<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase peningkatan layanan Pencatatan Sipil</b>	100%	100%	33,042,200	100%	30,000,000	100%	18,000,000	100%	23,000,000	100%	26,000,000	100%	30,000,000	
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Tersedianya Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	-	-	22,094,700	1Dok	30,000,000	-	0.00	1Dok	0.00	1Dok	0.00	1Dok	0.00	
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Layanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	-	-	10,947,500	2 Dok	0.00	2 Dok	18,000,000	2 Dok	23,000,000	2 Dok	26,000,000	2 Dok	30,000,000	
Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Tersedianya Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	-	-	0.00	Paket	0.00	Paket	0.00	Paket	0.00	Paket	0.00	Paket	0.00	
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Tersedianya Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	3Lap	3Lap	0.00	4 lap	0.00	4Lap	0.00	4 lap	0.00	4 lap	0.00	4 lap	0.00	
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	-	-	0.00	7Lap	0.00	7Lap	0.00	7Lap	0.00	7Lap	0.00	7Lap	0.00	
<b>Pengelolaan Pencatatan Sipil</b>	<b>Terlaksananya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase peningkatan penyelenggaraan pencatatan sipil</b>	100%	100%	0.00	100%	30,000,000	100%	18,404,400	100%	20,774,100	100%	25,875,200	100%	32,666,800	

Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	-	-	0.00	3 Lap	0.00	3 Lap	0.00	3 Lap	0.00	3 Lap	0.00	3 Lap	0.00	
Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	-	-	0.00	1Dok	0.00	-	0.00	1Dok	0.00	1Dok	0.00	1Dok	0.00	
Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	0.00	2 Lap	0.00	2lap	0.00	2 Lap	0.00	2 Lap	0.00	2Lap	0.00	
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Tersedianya Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	-	-	0.00	1Dok	0.00	1Dok	0.00	1Dok	0.00	1Dok	0.00	1Dok	0.00	
Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	Tersedianya Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	-	-	0.00	1 Lap	0.00	1 Lap	0.00	1 Lap	0.00	1 Lap	0.00	1 Lap	0.00	
Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Tersedianya Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	-	-	0.00	Dok	30,000,000	Dok	18,404,400	Dok	20,774,100	Dok	25,875,200	Dok	32,666,800	
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Tersedianya Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	-	-	0.00	1100 Orang	0.00	-	0.00	700 Orang	0.00	1100 Orang	0.00	1500 Orang	0.00	
Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Tersedianya Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	-	-	0.00	1Lap	0.00	1Lap	0.00	1Lap	0.00	1Lap	0.00	1Lap	0.00	
Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Tersedianya Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	-	-	0.00	12 Dok	0.00	-	0.00	12 Dok	0.00	12 Dok	0.00	12 Dok	0.00	
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Tersedianya Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil	-	-	0.00	1Lap	0.00	-	0.00	1Lap	0.00	1Lap	0.00	1Lap	0.00	
Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Tersedianya Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	-	-	0.00	1Lap	0.00	-	0.00	1Lap	0.00	1Lap	0.00	1Lap	0.00	
<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap peningkatan capaian pencatatan sipil</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	

Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Tersedianya Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	0.00	12 Dok	0.00	-	0.00	12 Dok	0.00	12 Dok	0.00	12 Dok	0.00
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Tersedianya Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	-	-	0.00	1Lap	0.00	-	0.00	1Lap	0.00	1Lap	0.00	1Lap	0.00
Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Tersedianya Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	-	-	0.00	1Lap	0.00	-	0.00	1Lap	0.00	1Lap	0.00	1Lap	0.00
Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Tersedianya Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	-	-	0.00	5 orang	0.00	5 Orang	0.00	5 orang	0.00	5 orang	0	7 orang	0.00
<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan</b>	<b>- Persentase OPD yang telah melaksanakan perjanjian kerjasama pemanfaatan data</b>	<b>62,96 %</b>	<b>62,96 %</b>	<b>42,101,200</b>	<b>63%</b>	<b>72,000,000</b>	<b>63,50 %</b>	<b>47,701,000</b>	<b>64%</b>	<b>57,056,900</b>	<b>64,50 %</b>	<b>58,582,900</b>	<b>70%</b>	<b>68,037,600</b>
<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan, Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>Persentase Ketersediaan database Kependudukan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>14,063,200</b>	<b>100%</b>	<b>22,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>22,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>24,056,900</b>	<b>100%</b>	<b>23,821,900</b>	<b>100%</b>	<b>27,037,600</b>
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Tersedianya Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan disajikan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan disajikan	-	-	14,063,200	2 Dok	22,000,000	2 Dok	22,000,000	2 Dok	24,056,900	2 Dok	23,821,900	2 Dok	27,037,600
Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Tersedianya Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	-	-	0.00	10 Dok	0.00	15 Dok	0.00	20 Dok	0.00	24 Dok	0.00	27 Dok	0.00
Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Tersedianya Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	-	-	0.00	1lap	0.00	-	0.00	1lap	0.00	1lap	0.00	1lap	0.00
<b>Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Terlaksananya Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentase peningkatan penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersusunnya Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	2Lap	2Lap	0.00	-	0.00	2Dok	0.00	2Dok	0.00	2Dok	0.00	2Dok	0.00
<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentase informasi administrasi yang diselenggarakan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>28,038,000</b>	<b>100%</b>	<b>50,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>25,701,000</b>	<b>100%</b>	<b>33,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>34,761,000</b>	<b>100%</b>	<b>41,000,000</b>
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	0.00	6Lap	0.00	-	0.00	7Lap	0.00	6Lap	0.00	10Lap	0.00

Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	Tersedianya Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	-	-	0.00	1Dok	0.00	-	0.00	1Dok	0.00	1Dok	0.00	1Dok	0.00
Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersedianya Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1Lap	1Lap	10,212,000	1Lap.	20,000,000	1Lap.	10,000,000	1Lap.	18,000,000	1Lap.	18,000,000	1Lap.	21,000,000
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	17 Dok	17 Dok	17,826,000	5Dok	30,000,000	7 Dok	15,701,000	7Dok	15,000,000	7 Dok	16,761,000	7Dok	20,000,000
Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersedianya Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	0.00	Lap	0.00	Lap	0.00	Lap	0.00	Lap	0.00	Lap	0.00
Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Tersedianya Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	-	-	0.00	2Dok	0.00	-	0.00	2Dok	0.00	2Dok	0.00	2Dok	0.00
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Tersedianya Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	-	-	0.00	Lap	0.00	Lap	0.00	Lap	0.00	Lap	0.00	Lap	0.00
Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Tersedianya Dokumen data Kependudukan yang akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen data Kependudukan yang akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	-	-	0.00	2Dok	0.00	-	0.00	2Dok	0.00	2Dok	0.00	2Dok	0.00
<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentase informasi administrasi kependudukan yang diawasi dan dibina</b>	-	-	0.00	100%	0.00	100%	0.00	100%	0.00	100%	0.00	100%	0.00
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersedianya Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	0.00	1lap	0.00	1Lap	0.00	1lap	0.00	1lap	0.00	1lap	0.00
Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Tersedianya Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	-	-	0.00	1Dok	0.00	1Dok	0.00	1Dok	0.00	1Dok	0.00	1Dok	0.00
Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Tersedianya Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	-	-	0.00	1Lap	0.00	1Lap	0.00	1Lap	0.00	1Lap	0.00	1Lap	0.00
<b>Program Pengelolaan Profil Kependudukan</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan</b>	<b>- Persentase Ketersediaan Data Profil Kependudukan</b>	100%	100%	4,968,900	100%	11,000,000	100%	19,273,900	100%	20,690,000	100%	21,042,900	100%	22,802,500
<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>Jumlah data profil kependudukan yang tersusun</b>	100%	100%	4,968,900	100%	11,000,000	100%	19,273,900	100%	20,690,000	100%	21,042,900	100%	22,802,500
Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	-	-	4,968,900	1Dok	0.00	1Dok	0.00	1Dok	0.00	1Dok	0.00	1Dok	0.00
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Tersusun dan tersedianya Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	100%	100%	0.00	1Dok	11,000,000	1Dok	19,273,900	1Dok	20,690,000	1Dok	21,042,900	1Dok	22,802,500

**Tabel 4.1.3. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Proritas Pembangunan**

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengentasan Kemiskinan terkait penerbitan KTP-el bagi masyarakat calon penerima bansos</li> <li>• Penguatan Pendidikan Gratis (PAUD) terkait penerbitan KIA bagi anak</li> </ul>	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	<p><b>Program Pendaftaran Penduduk</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan</li> <li>2. Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian masalah pendaftaran penduduk</li> <li>2. Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk</li> </ol> </li> <li>3. Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan</li> <li>4. Pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan</li> <li>5. Penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan</li> <li>6. Pengumpulan, analisis dan diseminasi data terkait pendaftaran dan Perkembangan Penduduk</li> <li>7. Penataan Pendaftaran Penduduk</li> <li>8. Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pendaftaran penduduk</li> <li>9. Pengadaan dokumen kependudukan selain blanko KTP-El, Formulir dan Buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan</li> </ol> </li> <li>• <b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi antar Lembaga pemerintah dan Lembaga non- pemerintah di kabupaten/kota dalam penerbitan pelayanan pendaftaran penduduk</li> <li>2. Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk</li> <li>3. Fasilitas Pendaftaran Penduduk</li> </ol> </li> </ul>	

		<p>Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan terkait pendaftaran penduduk</li> <li>5. Sosialisasi pendaftaran penduduk</li> <li>6. Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi terkait pendaftaran penduduk</li> <li>7. Komunikasi, Informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pendaftaran penduduk</li> <li>8. Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait pendaftaran penduduk</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan dan pelaporan penggunaan blanko dokumen kependudukan, formulir dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk.</li> <li>2. Pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk</li> <li>3. Bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk</li> </ol> </li> </ul> <p><b>Program Pencatatan Sipil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting</li> <li>2. Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil</li> <li>3. Pengumpulan, analisis dan diseminasi data pencatatan sipil</li> <li>4. Penyusunan tatacara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pencatatan sipil</li> <li>5. Pengadaan dokumen kependudukan selain blanko KTP-El, formulir dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan.</li> </ol> </li> <li>• <b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang</li> </ol> </li> </ul>	
--	--	---	--	--

			<p>Agama Kab/Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama Kab/Kota dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kab/Kota</li> <li>3. Koordinasi antar Lembaga pemerintah dan Lembaga non-pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayan Pencatatan Sipil</li> <li>4. Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil</li> <li>5. Penerimaan dan permintaan data kependudukan dari perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri terkait pencatatan sipil</li> <li>6. Fasilitasi terkait pencatatan sipil</li> <li>7. Penyelenggaraan Pemanfaatan data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil</li> <li>8. Sosialisasi terkait pencatatan sipil</li> <li>9. Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi terkait pencatatan sipil</li> <li>10. Komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencatatan sipil</li> <li>11. Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait pencatatan sipil.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko dokumen kependudukan, formulir dan buku untuk pelayanan pencatatan sipil</li> <li>2. Pembinaan dan Pengawasan terkait pencatatan sipil</li> <li>3. Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang,</li> </ol> </li> </ul>	
--	--	--	--	--

			<p>Agama Kab/Kota dan Pengadilan Agama mengenai pelaporan pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk dalam rangka pembangunan basis data kependudukan terkait pencatatan sipil.</p> <p>4. Bimbingan teknis terkait pencatatan sipil.</p>	
--	--	--	--	--

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan / atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran RPJMD, yang diuraikan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 4.1.4**  
**Indikator Kinerja Kunci Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Tahun 2025 - 2030**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	%	4,43	9,5	15	17	20	25	30	
2.	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	52,64	52,70	53	53,50	54	54,50	55	
3.	Cakupan kepemilikan KTP elektronik	%	94,27	94,50	95	96	97	98	99	
4.	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	%	93,25	93,25	93,50	94	95	96	97	
5.	Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	99,66	99,66	99,69	99,70	99,70	99,80	100	
6.	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraianya dilaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
8.	Persentase OPD yang telah melaksanakan Perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan	%	62,96	63	63	63,50	64	64,50	70	
9.	Persentase data profil kependudukan yang disusun tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	

**Tabel 4.1.5**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Tahun 2025 - 2030**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan lengkap	%	81,71	81,71	82,41	83,28	84,15	85,50	86,37	
2.	Persentase Capaian Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Kabupaten	%	85,59	85,59	85,96	86,57	87	87,37	87,74	
3.	Nilai sakip OPD	%	64,85	64,85	65	65,55	68,35	70,48	72	

**Tabel 4.1.6**  
**Penetapan Target Indikator TPB/SDG Kabupaten Kepulauan Selayar 2026 - 2030**

Kode Indikator	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target SDGS						
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Tujuan SDGs 16 : Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan									
1.6.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua termasuk pencatatan kelahiran									
16.9.1*	Proporsi anak dibawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencacatan sipil menurut umur	%	94,13	94,50	94,50	95,00	95,50	96,00	97,00	
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran untuk penduduk umur 0 - 17 Tahun	%	93,25	93,25	93,50	94,00	95,00	96,00	97,00	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD kedalam strategi, kebijakan umum dan program prioritas dan arah kebijakan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Renstra merupakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan dokumen perencanaan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan isu strategis bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan terkini.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ini dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi pelaksanaan program pembangunan, sekaligus menjaga focus sasaran yang akan dicapai pada tahun 2029 mendatang.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan mendukung sepenuhnya terhadap visi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025 – 2029 yaitu “Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera”. Adapun misi yang menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar adalah misi pertama yaitu “Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif”.

Sebagai Dokumen Perencanaan lima tahun, Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditambahkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah terukur dan bersifat outcome, Oleh karena itu untuk menjamin keberhasilan outcome tersebut harus ada komitmen kerjasama dari para pihak (stakeholders) yang berkompeten di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Selanjutnya Renstra juga merupakan acuan yang wajib dipedomani dan dilaksanakan oleh Pejabat Struktural dan Staf dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk mengetahui kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, maka pada setiap tahun akan dilakukan evaluasi dengan cara membandingkan tugas, indicator kinerja dengan realisasi program maupun kegiatan. Keberhasilan dari pelaksanaan renstra ini beserta hambatan yang ditemukan akan tergambar nantinya dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun.

Demikian Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar 2025-2029 ini disusun, semoga bermanfaat bagi stakeholders dan menjadi Pedoman kerja selama 5 (lima) tahun ke depan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng, 20 September 2025

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL**



**Drs. ANDI RATONRANGI PASBAL, M. M**  
**Pangkat Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19670905 198811 1 003**

**Tabel Pemetaan Rencana Aksi dan Pagu Tahun Anggaran 2026 – 2030**

VISI	KATA KUNCI VISI	MISI	ASTA CITA	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM KERJA	KEGIATAN	PROGRAM PERMENDAGRI NOMOR 900.1-2850 Tahun 2025	PERANGKAT DAERAH	RENCANA AKSI	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030																												
														TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.																											
BERSAMA MEMBAWA SELAYAR MAJU & SEJAHTERA	MAJU	Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	1. Penguatan Kemiskinan terkait penerbitan KTP-el bagi masyarakat calon penerima bansos	Program Peningkatan Kualitas Birokrasi	Meningkatkan kinerja pelayanan di kabupaten dengan teknologi digital	Program Pendaftaran Penduduk	DISDUKCAPIL	Melaksanakan pelayanan keliling administrasi kependudukan melalui jemput bola	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase peningkatan layanan pendaftaran penduduk	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Administrasi Kependudukan	1 Dok	0,00	1 Dok	0,00	1 Dok	0,00	1 Dok	0,00	1 Dok	0,00																											
														2. Penguatan Pendidikan Gratis (PAUD) terkait penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak	Meningkatkan pelaksanaan digitalisasi pelayanan di desa	Mendorong peningkatan capaian kepemilikan identitas kependudukan	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	3 Dok	30.000.000	3 Dok	30.000.000	3 Dok	30.000.000	3 Dok	35.904.300	3 Dok	35.000.000																						
																			Meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pelayanan administrasi kependudukan	Penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00																			
																						Optimalisasi pelaksanaan sosialisasi sampai ke tingkat desa/keurahan baik di Wilayah daratan maupun di wilayah	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2 Lap	0,00	2 Lap	0,00	2 Lap	0,00	2 Lap	0,00	2 Lap	0,00																
																									Mendorong peningkatan aksesibilitas data kependudukan untuk pelayanan publik	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	3 Dok	0,00	3 Dok	0,00	3 Dok	0,00	3 Dok	0,00	3 Dok	0,00													
																												Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik secara prima	Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	1 Lap	0,00	1 Lap	0,00	1 Lap	0,00	1 Lap	0,00	1 Lap	0,00										
																															Mendorong peningkatan capaian identitas kependudukan digital dan menjamin keakuratan pelaporan data kependudukan	Penerbitan Dokumen Atas Hasil pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	1 dok	0,00	1 Dok	0,00	1 dok	0,00	1 dok	0,00	1 dok	0,00							
																																		Peningkatan penggunaan data kependudukan untuk pelayanan publik dan penentuan kebijakan untuk pembangunan	Pengumpulan, Analisis dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah Dokumen Pengumpulan Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk	1 dok	0,00	1 Dok	0,00	1 dok	0,00	1 dok	0,00	1 dok	0,00				
																																					Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Peningkatan Penataan Pendaftaran Penduduk	Penyusunan Tata Cara Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	3 Dok	0,00	3 Dok	0,00	3 Dok	0,00	3 Dok	0,00	3 Dok	0,00
																																									Penggadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Dok	0,00	1 Dok	62.000.000	1 Dok	0,00	1 Dok
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase peningkatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Kordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten dalam penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	3 lap	0,00	3 Lap	0,00	3 Lap	0,00	3 Lap	0,00	3 lap	0,00																																					



								Optimalisasi pelaksanaan sosialisasi sampai ke tingkat desa/kelurahan baik di Wilayah daratan maupun di wilayah kepulauan			Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	4 lap	0,00	4 Lap	0,00	4 lap	0,00	4 lap	0,00	4 lap	0,00
								Mendorong peningkatan aksesibilitas data kependudukan untuk pelayanan publik			Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Lap	0,00	1 Lap	0,00	1 Lap	0,00	1 Lap	0,00	1 Lap	0,00
								Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik secara prima	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase peningkatan penyelenggaraan pencatatan sipil	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	3 Lap	0,00	3 Lap	0,00	3 Lap	0,00	3 Lap	0,00	3 Lap	0,00
								Mendorong peningkatan capaian identitas kependudukan digital dan menjamin keakuratan pelaporan data kependudukan			Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	1 Dok	0,00	-	0,00	1 Dok	0,00	1 Dok	0,00	1 Dok	0,00
								Peningkatan penggunaan data kependudukan untuk pelayanan publik dan penentuan kebijakan untuk pembangunan			Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Peayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten dalam Penertiban Pelayanan Peayanan Pencatatan Sipil	2 Lap	0,00	2 lap	0,00	2 Lap	0,00	2 Lap	0,00	2 Lap	0,00
											Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	1 Dok	0,00	1 Dok	0,00	1 Dok	0,00	1 Dok	0,00	1 Dok	0,00
											Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	1 Lap	0,00	1 Lap	0,00	1 Lap	0,00	1 Lap	0,00	1 Lap	0,00
											Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Dok	30.000.000	Dok	18.404.400	Dok	20.774.100	Dok	25.875.200	Dok	32.666.800
											Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	1100 Orang	0,00	-	0,00	700 Orang	0,00	1100 Orang	0,00	1500 Orang	0,00
											Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Lap	0,00	1 Lap	0,00	1 Lap	0,00	1 Lap	0,00	1 Lap	0,00

										Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	12 Dok	0,00	-	0,00	12 Dok	0,00	12 Dok	0,00	12 Dok	0,00	
										Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil	1 Lap	0,00	-	0,00	1 Lap	0,00	1 Lap	0,00	1 Lap	0,00	
										Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	1 Lap	0,00	-	0,00	1 Lap	0,00	1 Lap	0,00	1 Lap	0,00	
								Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap peningkatan capaian pencatatan sipil	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	12 Dok	0,00	-	0,00	12 Dok	0,00	12 Dok	0,00	12 Dok	0,00	
										Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	1 Lap	0,00	-	0,00	1 Lap	0,00	1 Lap	0,00	1 Lap	0,00	
										Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	1 Lap	0,00	-	0,00	1 Lap	0,00	1 Lap	0,00	1 Lap	0,00	
										Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	5 orang	0,00	5 Orang	0,00	5 orang	0,00	5 orang	0	7 orang	0,00	
							Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Ketersediaan database Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan disajikan	2 Dok	22.000.000	2 Dok	22.000.000	2 Dok	24.056.900	2 Dok	23.821.900	2 Dok	27.037.600
										Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	10 Dok	0,00	15 Dok	0,00	20 Dok	0,00	24 Dok	0,00	27 Dok	0,00	
										Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	1 lap	0,00	-	0,00	1 lap	0,00	1 lap	0,00	1 lap	0,00	
								Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	-	0,00	2 Dok	0,00	2 Dok	0,00	2 Dok	0,00	2 Dok	0,00	

										Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase informasi administrasi kependudukan yang diselenggarakan	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6 Lap	0,00	-	0,00	7 Lap	0,00	6 Lap	0,00	10 Lap	0,00		
												Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	1 Dok	0,00	-	0,00	1 Dok	0,00	1 Dok	0,00	1 Dok	0,00		
												Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Lap	20.000.000	1 Lap	10.000.000	1 Lap	18.000.000	1 Lap	18.000.000	1 Lap	21.000.000		
												Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dok	30.000.000	7 Dok	15.701.000	7 Dok	15.000.000	7 Dok	16.761.000	7 Dok	20.000.000		
												Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Lap	0,00	Lap	0,00	Lap	0,00	Lap	0,00	Lap	0,00		
												Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	2 Dok	0,00	-	0,00	2 Dok	0,00	2 Dok	0,00	2 Dok	0,00		
												Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Lap	0,00	Lap	0,00	Lap	0,00	Lap	0,00	Lap	0,00		
												Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen data Kependudukan yang akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	2 Dok	0,00	-	0,00	2 Dok	0,00	2 Dok	0,00	2 Dok	0,00		
										Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase informasi administrasi kependudukan yang diawasi dan dibina	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Informasi Administrasi Kependudukan	1 lap	0,00	1 Lap	0,00	1 lap	0,00	1 lap	0,00	1 lap	0,00		
												Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	1 Dok	0,00	1 Dok	0,00	1 Dok	0,00	1 Dok	0,00	1 Dok	0,00		
												Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Lap	0,00	1 Lap	0,00	1 Lap	0,00	1 Lap	0,00	1 Lap	0,00		
										Program Pengelolaan Profil Kependudukan		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah data profil kependudukan yang tersusun	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 Dok	0,00	1 Dok	0,00	1 Dok	0,00	1 Dok	0,00	1 Dok	0,00
										-Persentase Ketersediaan Data Profil Kependudukan		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dok	11.000.000	1 Dok	19.273.900	1 Dok	20.690.000	1 Dok	21.042.900	1 Dok	22.802.500		



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 149-tn/ III /TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PADA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025- 2029**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Persiapan Penyusunan Rencana Strategis meliputi Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 135);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 862);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar Periode Tahun 2025 - 2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan;
  - b. mengumpulkan data dasar penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029;

- c. melakukan identifikasi permasalahan atau isi-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. melakukan penelaahan pelayanan terhadap pencapaian visi, misi, dan program Bupati-Wakil Bupati terpilih;
- e. melakukan penelaahan pelayanan terhadap pencapaian dokumen perencanaan lainnya;
- f. merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang akan diwujudkan dengan mengacu pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
- g. merumuskan strategis dan arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja;
- h. mengidentifikasi dan menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
- i. merumuskan indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan serta rencana capaiannya (target) sebagai acuan dalam penilaian tingkat keberhasilan pencapaian sasaran;
- j. menetapkan pagu indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan; dan
- k. menyusun dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pos Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2025.

**KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang *bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.*

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

<b>PARAF</b>	
TANGGAL:	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 3 Maret 2025

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

*[Signature]*

**MUHAMMAD NATSIR ALI**

<b>KABAG HUKUM</b>	Paraf <i>[Signature]</i>
--------------------	-----------------------------

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 149-III / III / TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA  
STRATEGIS PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN  
SELAYAR TAHUN 2025-2029**

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PADA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN  
SELAYAR TAHUN 2025 - 2029**

- |               |   |  |
|---------------|---|--|
| A. Ketua      | : | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil   |
| B. Sekretaris | : | Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil   |
| C. Anggota    | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>2. Kabid. Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil</li> <li>3. Kabid. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>4. Kabid PPEPD Bapperida</li> <li>5. Kepala Sub Bagian Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>6. Jalil Setiawan Jamal, S.Pd., M.Si ( Perencana Muda Bapperida)</li> <li>6. Rosniati (Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)</li> <li>7. Rahim Mappa, S.Pd (Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)</li> </ol> |

P A R A F	
TANGGAL :	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**



**MUHAMMAD NATSIR ALI**

KABAG. HUKUM	Paraf
